



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke-	:	5 (lima)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 12 Juni 2023
Waktu	:	Pukul 14.30 s.d. 18.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat	:	Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	:	1. Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024;serta 2. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	:	Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
Hadir	:	A. Anggota DPR RI: 35 dari 53 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9 dari 11 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Dr. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 4. Drs. I Made Urip, M.Si. 5. Dr. H. Sustrisno., S.E., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. Maria Lestari, S.Pd. 8. Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 9. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con. 2. Fraksi Partai Golongan Karya 5 dari 8 orang Anggota 1. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M. 2. Firman Soebayo, S.E., M.H. 3. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.

4. Alien Mus
 5. Ravindra Airlangga, M.S.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari, D.E.S.S., M.Sc.
 5. Dr. Azikin Solthan, M.Si.
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal
 3. Julie Sutrisno
 4. Yessy Melania, S.E.
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam
 4. Edward Tanur, S.H.
 6. Fraksi Partai Demokrat
2 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet.
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, Sp., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. Ir. Alimin Abdullah
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul chusnah

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 1) H. Sunarna, S.E., M.Hum.

Fraksi Partai Golongan Karya

- 1) Ir. Panggah Susanto, M.M.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

- 1) Ir. Dwita Ria Gunadi

Fraksi Partai Demokrat

- 1) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.

C. Pemerintah

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D.);
3. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.);
4. Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.);
5. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Prof. Dr. Satyawati Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc.);
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.);
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun. (Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc.);
8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.);
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.);
10. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.);
11. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.)
12. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.S.E.);

13. Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (Drs. Ade Palguna Ruteka);
14. Plh. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Drasopolino, M.Sc.);
15. Plh. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc.);
16. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Ir. Hartono, M.Sc.)
17. Direktur Utama Perum Perhutani (Wahyu Kuncoro);
18. Direktur Utama PT Inhutani I (Oman Suherman; dan
19. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

(suara tidak terekam) dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Republik Indonesia masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, tanggal 3 April 2023 dan Rapat Internal Komisi IV tanggal 17 Mei maka hari ini 12 Juni 2023, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menghadirkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama Inhutani I dan Direktur Utama Inhutani V dalam rangka membahas RKP dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 dan isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Sesuai dengan Pasal 276 ayat (1) tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Rapat kerja ini kita mulai Pukul 14.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 17.30, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;

4. Jawaban Menteri;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup;

Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib antara lain adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara, yang meliputi rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah.

Selanjutnya, hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja hari ini berdasarkan Surat Badan Anggaran Nomor: B/6570/AG.01.02/05.2023, tanggal 30 Mei mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagai Acuan dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 antara Komisi dengan Mitra Kerjanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pandemi Covid 19 terjadi begitu cepat melanda semua negeri di dunia dan mengakibatkan dampak yang serius dalam berbagai sektor kehidupan. Namun demikian, kasus yang diakibatkan oleh pandemi tidak semuanya membawa pengaruh buruk. Sebaliknya, persis juga membawa kehidupan lebih baik seperti halnya di Indonesia adanya *post* pandemi Covid 19 menjadi momentum untuk mengakselerasi adaptasi mengedepankan inovasi dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki titik berat untuk mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, masih ada beberapa pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh KLHK dalam waktu dekat, antara lain percepatan distribusi lahan melalui program restorasi masih jauh dari target 12 juta hektar. Target restorasi gambut dan mangrove, target peningkatan kualitas lingkungan hidup, percepatan penyelesaian kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Saya tegaskan lagi penyelesaian peraturan-peraturan tata cara yang dibangun di dalam kawasan hutan tanpa izin serta penyelesaian peraturan tata cara perdagangan karbon sebelum beroperasinya bursa karbon di bulan September 2023. Karena yang saya dapatkan info ini sudah banyak yang menjual karbon berarti ini sudah melanggar peraturan. Saya minta ditindak tegas hal-hal tersebut di atas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tahun 2024 merupakan tahun terakhir Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melaksanakan kegiatannya restorasi gambut dan mangrove. Berdasarkan Perpres yang sama, target luasan ekosistem gambut yang harus direstorasi oleh BRGM berkurang menjadi 20% dari target 1,2 juta hektar ekosistem gambut atau hanya sekitar 240.000 hektar. Oleh karena itu, sudah seharusnya anggaran dan kegiatan restorasi gambut disesuaikan dengan Perpres tersebut.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah program rehabilitasi mangrove yang sampai saat ini terlihat jalan di tempat akibat ketersediaan anggaran rehabilitasi mangrove. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan diupayakan bersama mengenai kelanjutan program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove pasca 2024.

Selanjutnya, dalam kesepakatan rapat kerja, Komisi IV meminta Menteri LHK dapat menyampaikan penjelasan beberapa isu aktual sebagai berikut:

1. Penambangan pasir timah secara illegal di Kecamatan Damau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Perkembangan pengumpulan data dan keterangan sebagai tindak lanjut penyegelan Gudang Arang Mangrove dan pembalakan illegal pohon mangrove di Provinsi Riau serta didudukkannya secara illegal tanah yang statusnya adalah hutan buru.

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri LHK untuk menyampaikan penjelasan terkait di atas.

Waktu dan tempat saya persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih, Ketua yang kami hormati.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Om swastiastu.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas undangan untuk rapat kerja hari ini.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,
Pak Wamen dan seluruh jajaran eksekutif yang hadir,

Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas rapat kerja hari ini dan izinkan kami akan melaporkan sebagaimana surat dari yang terhormat Pimpinan DPR tentang rapat kerja hari ini yaitu hal-hal berkaitan dengan capaian pembangunan KLHK pada tahun 2022, kemudian RKA dan RKP KLHK tahun 2024, serta isu-isu aktual dan hasil kunjungan reses.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat,

Pada bagian pertama, izinkan kami melaporkan tentang capaian pembangunan KLHK per 2022. Mohon periksa pada halaman 6 bahwa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghasilkan pertumbuhan PDB dan ekspor LHK untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga adanya surplus neraca perdagangan non migas. Jadi, untuk tahun 2022 angka di KLHK 118,39 triliun kontribusi. Mohon izin juga melaporkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas kelompok tani hutan yang ditunjukkan dengan nilai transaksi kelompok yaitu 467 juta per kelompok usaha perhutanan sosial per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 181 juta.

Kemudian, kualitas lingkungan juga kami mohon izin melaporkan bahwa untuk tahun 2022 terdapat peningkatan pada indeks 72,42 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 71,45. Saya memberikan... mohon periksa pada halaman 7, bagaimana contoh-contoh peningkatan kapasitas kelompok tani dalam transaksi keuangan seperti yang kami laporkan dan selanjutnya pada *screen* 8, mohon periksa bahwa memang kelompok usaha perhutanan sosial ini terus dibina dan mengalami peningkatan kapasitas kelompok yang kita *cover* dalam bentuk *platinum*, *gold*, kemudian *silver*, dan pemula. Jadi, kelompok yang *gold* ini yang sudah bisa melakukan ekspor dan juga yang *platinum*.

Kemudian, saya mohon izin melaporkan tentang pembangunan desa dengan perhutanan sosial. Jadi, memang konsep hutan sosial ini tadi seperti yang diharapkan oleh yang terhormat Pak Ketua bahwa dia untuk membangun pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dalam hal ini pertumbuhan desa. Prinsipnya adalah asas kelola hutan kemudian penyerapan tenaga kerja dan penghasilan bagi masyarakat serta dengan tetap memperhatikan kelestarian. Jadi, format pembinaanya berupa kelembagaan, akses lahan, kapasitas organisasi dari kelompok tani hutan, dan juga sarana termasuk pemasaran dan upaya-upaya pemupukan modal. Pada saat sekarang telah berkembang, yang terhormat Bapak Presiden telah memberikan dukungan bahwa permasalahan hutan sosial ini bukan hanya persoalan KLHK tapi dia sudah meluas sampai terutama di hilirnya untuk masyarakat bisa berkembang menjadi masyarakat yang produktif.

Selanjutnya, kami mohon izin melaporkan pada halaman 10 tentang laju deforestasi dan degradasi hutan.

Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat,

Persoalan deforestasi sampai sekarang dan terutama pada tingkat internasional menjadi perhatian yang keras dikaitkan dengan rantai suplai di pertanian. Jadi seperti karet, kakao, sawit terutama dan juga sapi. Ada gambaran yang menggembirakan bahwa sejak tahun 2014, kita bisa mengelola deforestasi ini kalau lihat datanya di tahun 2015 itu kira-kira angkanya di 1,09 juta hektar dalam satu tahun. Kemudian pada tahun 2019, kira-kira 460 ribu hektar dan tahun 2021 angkanya 110 ribu hektar. Kami sedang finalisasi angka di 2022 kira-kira 107 ribu hektar. Jadi, memang semakin baik gambaran pengurangan deforestasi kita tetapi memang bahwa secara internasional ini menjadi perhatian yang cukup intensif dan kita sedang kelola dengan sebaik-baiknya.

Di sisi yang lain, Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, saya mohon izin melaporkan tentang emisi karbon. Kalau lihat datanya seperti ini, kita lihat grafik yang paling atas. Gambar grafik itu adalah inventarisasi gas rumah kaca apabila kita tidak ngapa-ngapain. Jadi berlaku seperti apa adanya seperti tahun 2010 kemudian yang di bawahnya yang di tengah yaitu *contour measure* pertama artinya, apabila kita bekerja berdasarkan kekuatan nasional dan yang garis ketiga itu adalah upaya penurunan emisi gas rumah kaca apabila kita mendapatkan dukungan, teknik, dan kerja sama luar negeri. Kalau kita lihat datanya, kita lihat grafik batang atau histogram, yang biru itu inventarisasi gas rumah kaca termasuk dari hutan. Kalau yang merah tidak termasuk dari hutan, yang tidak termasuk hutan adalah energi, transportasi, kemudian perindustrian, sampah dan limbah. Jadi, itu yang merah-merah. Jadi, kalau kita lihat data grafik batangnya, semua sejak tahun 2019... 2020 dari 2019 itu sudah di bawah *contour measure*.

Kedua, artinya kita sudah bisa mencoba sedemikian rupa mencapai tetapi ada tetapnya kalau kita lihat di halaman berikut, kita memang harus benar-benar menjaga ini dengan baik karena fluktuasinya cukup tinggi. Jadi, angkanya kalau di angkanya pada tahun 2020 di 47,28%, kita berhasil menurunkan, di tahun 2021 43%, kita masih sedang hitung di tahun 2022. Artinya, *manageable* sampai dengan sekarang tetapi tetap harus kita ekstra hari-hati menjaga karena fluktuasi yang tinggi. Hadirnya agenda *forest and landuse net sink* 2030 sebagaimana telah kami laporkan pada rapat-rapat terdahulu, itu juga memberikan dukungan yang cukup positif terhadap turunnya gas rumah kaca.

Selanjutnya, Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang saya hormati, pada *screen* 13 mohon periksa kinerja KLHK di tahun 2020 hingga 2022 seperti misalnya indeks kualitas lingkungan hidup. Menurut tadi kami sudah laporkan laju penurunan deforestasi kemudian juga luas kawasan bernilai konservasi tinggi ini juga sangat penting, selain kita menjaga dari proses fragmentasi habitat di waktu yang lalu akibat perizinan, ini juga kita konsolidasikan agar konservasi ini semakin kuat di Indonesia. Kemudian, luas kawasan hutan yang dikonsolidasikan dan selanjutnya.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Selanjutnya, saya mohon izin melaporkan realisasi anggaran untuk tahun 2023 per 8 Juni 2,78 dan per hari ini tadi pagi jam 10, kami cek angkanya 27,98. Ini angka ini dengan sudah adanya tambahan dari Kementerian Keuangan kepada KLHK senilai 418 Miliar yaitu PNPB dari penggunaan kawasan hutan yang harus dipakai untuk keperluan pengukuhan kawasan, jadi penataan batas. Demikian kurang lebih gambaran tentang evaluasi.

Izinkan selanjutnya, kami melaporkan tentang kondisi 2024 sebagaimana RKP dan RKAKL. Mohon periksa bahwa ini sudah kita coba ikuti dan terus konsisten sejak 2022, 2023, hingga 2024 pada *screen* 17 yaitu pengembangan akses-akses kelola masyarakat, ekonomi sirkuler, dan perekonomian wilayah. Demikian pula di 2023 dan 2024. Jadi perbaikan seluruh kondisi, terima kasih tadi sudah ada beberapa catatan yang disampaikan oleh yang terhormat Ketua Pimpinan Komisi IV DPR RI untuk menjadi perhatian. Sasaran menurut makro ekonomi pada *screen* 18 yaitu pertumbuhan PDB sektor LHK termasuk ekspor, kemudian peningkatan nilai transaksi kelompok masyarakat dan keuangan, dan penurunan kebakaran hutan dan lahan, laju deforestasi, serta parameter lingkungan.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota,

Saya mohon izin melaporkan bahwa tentang situasi kebakaran hutan dan lahan pada saat ini sudah masuk bulan Juni mulai bulan panas. Pada saat ini sudah ada 7 provinsi yang menetapkan kondisi atau pernyataan siaga darurat yaitu Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi, NTT, Kalteng, dan Kalsel. Kemudian, pada saat ini juga sudah ada 15 unit pesawat yang *standby* dari BRIN, BNPB, dan KLHK. Pada kondisi-kondisi tertentu juga Ketika kebakaran itu atau *hot spot* terindikasi muncul di sekitar kawasan lokasi swasta, kami menugaskan swasta juga untuk mengatasi. Pada saat ini telah dilakukan teknik modifikasi cuaca seperti di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, NTT pada bulan April-Juni. Memang seperti selalu kami laporkan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, bahwa pola kebakaran hutan itu agak berbeda di Riau yang biasanya intens di bulan Maret dan April kemudian turun lalu nanti naik lagi di bulan Juni kemudian bergerak terus sampai Agustus kemudian nanti kencangnya kira-kira pertengahan September. Kami juga mohon izin melaporkan bahwa pada saat ini tercatat di KLHK bahwa areal terbakar sebesar 16.637 hektar per Juni 2023. Kalau dibandingin dengan tahun lalu pada era yang sama jadi pada Januari, Juni di tahun lalu 35.212 hektar. Jadi, sekarang 16 ribu.

Saya juga mohon izin melaporkan bahwa dari proyeksi *rainfall* atau curah hujan menengah sampai mulai tinggi masih terjadi di Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku dan Papua Barat tetapi daerah-daerah seperti Pulau Jawa, Sumbagsel, dan bagian Kalimantan Kalteng bagian bawah sampai ke selatan itu relatif kering dan juga sebagian di Sumatera bagian Utara.

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati,

APBN tahun 2024 untuk KLHK mohon periksa pada halaman 19 yaitu proyeksi pendapatan yaitu 6,74 triliun dan pagu indikatif untuk penganggaran

atau belanja sebesar Rp7.539.000.000.000,00. Jadi pagu indikatif pada *screen* berikutnya yaitu 7,53 triliun dengan distribusi program, mohon periksa pada halaman 20 yaitu program dukungan manajemen 3,56 triliun, program pengelolaan hutan berkelanjutan 2,44 triliun, program Pendidikan dan pelatihan vokasi 190 miliar, program kualitas lingkungan hidup 1,2 triliun dan program ketahanan bencana dan iklim 139 miliar.

Screen 21 menunjukkan sumber dana yaitu dari rupiah murni, dari PNBPN, dari hibah luar negeri, dan pada *screen* 22 ini gambaran distribusi penganggaran menurut unit kerja Eselon I Kementerian LHK, yang tertinggi yaitu konservasi sumber daya alam dan ekosistem 1,7 triliun, kemudian daerah DAS RHL 1,29 triliun, lalu planologi pengukuhan tata batas 717 miliar, dan pemulihan kerusakan lingkungan 595 miliar, dan seterusnya. Angka-angka persisnya menurut operasional, non operasional juga pegawai, barang dan lain-lain mohon periksa pada halaman 23.

Apa saja indikator kinerja utama untuk tahun 2024 di Kementerian LHK ini mendapatkan mandat tugas di pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial, dan tata kelola. Jadi, indikator kinerja utamanya seperti indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, tadi kami laporkan juga untuk inventarisasi gas rumah kaca serta pengendalian deforestasi dan seterusnya, mohon periksa pada halaman 24.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan saya melaporkan tentang prioritas nasional dalam pembangunan LHK 2024. Mandat nasional untuk KLHK yaitu pada prioritas nasional pertama, kedua, ketiga, dan keenam yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Jadi disini yang tadi kelihatannya untuk ketahanan air, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan terutamanya pengendalian wilayah hulu, kemudian peningkatan nilai tambah, daya saing, industri pengolahan dan juga destinasi wisata. Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan dan menjamin pemerataan di dalam operasionalnya memang tersebar tapi yang secara khusus untuk kesenjangan pemerataan ini membantu penyiapan di ibukota negara terutama berkaitan dengan kesiapan-kesiapan awal perencanaan lingkungan hidup strategis, pengendalian lingkungan dan sebagainya. Kemudian, prioritas nasional yang ketiga yaitu SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta prioritas nasional yang keenam yaitu membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Secara rinci untuk 10 unit di KLHK, mohon periksa pada halaman 26, 27, 28, dan halaman 29.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami melaporkan untuk indikasi anggaran berbasis masyarakat pada sektor KLHK untuk tahun 2024 yaitu Rp1.752.000.000.000,00, untuk tahun 2024 ini angkanya meningkat dari tahun 2023 Rp1.674.046.000.000,00. Jadi, ini arahnya untuk investasi pada sektor

KLHK untuk penguatan modal sosial masyarakat pada tingkat tapak dan mohon periksa secara rinci per direktorat jenderal yaitu pada halaman 31, halaman 32, dan halaman 33 bagi 10 unit kerja Kementerian KLHK termasuk BRGM.

Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Kami juga mengikuti kunjungan-kunjungan reses di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah kami coba untuk tindak lanjuti sambal terus kami ikuti perkembangannya dan penanganannya di lapangan, mohon periksa pada halaman 35, 36 untuk Yogyakarta dan selanjutnya juga yang di Jawa Barat di Subang ini juga kami terus ikuti perkembangannya. Kita sedang tangani juga terutama yang berkaitan dengan Tangkuban Perahu ini menjadi catatan, ini sedang dipersiapkan. Pada saat ini memang dari 14 jenis PNBPN yang dari kehutanan itu baru 4 yang boleh dipakai oleh KLHK yaitu DRPSDH, penggunaan kawasan dan Gakkum, yang konservasi belum. Jadi, nanti kami akan diskusikan dengan Kementerian Keuangan kiranya ini bisa memperkuat TWA-TWA yang menghasilkan PNBPN untuk bisa memberikan efek langsung kepada masyarakat. Memang di Tangkuban Perahu itu masyarakatnya perlu mendapatkan sesuatu dari destinasi wisata Tangkuban Perahu yang menurut catatan KLHK juga termasuk yang *visit*-nya atau kunjungannya sangat tinggi yaitu dari multiplier efek dan ini sudah dikomunikasikan dengan bupati dan pemegang izin dan yang penting tadi adalah bagaimana PNBPN-nya bisa dikelola dan disampaikan untuk kerja-kerja bersama masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada Kunker ke Jawa Timur banyak yang bisa digali di sana dan kami akan terus tingkatkan sebagaimana arahan pada saat kunjungan kerja. Di Taman Safari Indonesia, kami mendapatkan catatan-catatan dan kami perhatikan mohon periksa pada halaman 42 dan juga kementerian terus berusaha untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup bagi generasi muda.

Selanjutnya, terkait dengan kunjungan kerja ke luar negeri, kita memang memetik pelajaran dari CCTV dan kamera *trap*, kita akan coba terapkan untuk 24 jam yang sistem kamera *trap* itu sudah ada tapi yang CCTV 24 jam ini kemarin baru ada di Loji untuk kalau nggak salah untuk anak elang, baru itu dan itu juga masih sangat minim. Kami akan dorong dan kita bisa kembangkan karena pada dasarnya kalau untuk saat sekarang dukungan dana-dana bagi lingkungan hidup itu sudah bisa diakses melalui dana BPD LH. Sementara itu yang kunjungan ke Tiongkok tentang *breeding loan* kita memang perlu mempelajari banyak dari pola-pola di Tiongkok sehubungan dengan cara mereka mengelola bagaimana peminjaman dan *breeding* dari panda, jadi banyak hal yang kita pelajari.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Tentang pasir timah illegal, Gudang arang illegal, nanti saya akan minta Pak Dirjen menyiapkan catatan tertulisnya ya Pak Roy ya, karena ini sangat rinci juga dan memang sudah menjadi catatan yang terhormat Pimpinan dan Anggota pada rapat-rapat kerja yang juga tanah hutan buru. Memang di waktu yang lalu ini menjadi catatan penting dalam DPCLS, kami perhatikan.

Kelihatannya itu yang ingin kami laporkan Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat. Kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih penjelasannya Bu Menteri yang kami hormati.

Selanjutnya, kita ke sesi tanggapan maupun pertanyaan dari juru bicara fraksi. Saya persilakan, ya kita mengingat waktu Bapak-Ibu sekalian, ini kan baru rapat kita yang pertama dalam siklus anggaran untuk tahun 2024 dan besok sore sudah kita harus ajukan seluruh rancangan anggaran kementerian lembaga ke Badan Anggaran. Jadi kami minta untuk tepat pada mekanisme waktu, mohon diperhatikan waktu bicaranya.

Saya persilakan yang pertama dari fraksi Partai Gerindra, Ibu Endang Thohari. Bu Endang, silakan Bu.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Baik,

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom dan Salam Indonesia Raya,

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Bapak Wamen dan Pak Sekjen beserta jajarannya,
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajaran,
Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajarannya, dan
Direktur Utama PT Inhutani I beserta jajaran dan Inhutani V,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas dengan baik.

Sebelumnya, kami mengucapkan selamat hari lingkungan hidup semoga generasi kita bisa mewariskan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita kelak.

Mewakili Fraksi Gerindra dari Komisi IV DPR RI, kami menyampaikan tanggapan masukan dan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, pada realisasi anggaran tahun 2023 tercatat Direktorat Jenderal PPKL baru merealisasikan anggaran sebesar 8,9% dan BRGM baru 17,7%. Untuk itu, kami meminta penjelasan kepada Ibu Menteri dan jajarannya mengapa serapan anggarannya masih sangat kecil karena secara umum realisasi anggaran tahun 2023 masih di bawah 30%. Kemudian, pada postur APBN 2024, KLHK terdapat ada rencana pendapatan yang lebih kecil dari rencana pagu indikatif yang dibutuhkan dimana rencana pendapatan sebesar 6,746 triliun dan pagu indikatif sebesar 7,539 triliun untuk memperkuat dan meningkatkan rencana pendapatan. Kami Kembali meminta serta mendorong Ibu Menteri beserta jajarannya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak terhutang dan kegiatan perkebunan sawit dalam kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya, kami juga minta laporan perkembangan penyelesaiannya.

Kemudian, kami juga mengapresiasi atas tindakan KLHK dalam gerakan membersihkan sekitar 135 pantai dengan serentak di seluruh Indonesia yang melibatkan seluruh elemen baik dari pemerintah, TNI, Polri, dan aktivitas lingkungan serta seluruh lapisan masyarakat. Namun, kami juga ingin selain apresiasi, ingin mendorong masyarakat mempunyai kesadaran dalam mengelola sampah makin meningkat. Hal ini ditunjukkan juga dengan semakin banyaknya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat namun demikian kami meminta Gerakan membersihkan pantai ini tidak hanya menjadi hal yang seremonial saja sifatnya. Salah satu anggaran terbesar dari KLHK berada pada Direktorat Jenderal PDASRH, demikian pula postur Anggaran KLHK pada tahun 2024. Namun, sejauh ini kami belum mendapat laporan rinci dan secara lengkap tentang penyelenggaraannya seperti program kebun bibit rakyat yang baru saja kami laksanakan juga di Cianjur dan pemulihan kondisi DAS atas atau kegiatan pembibitan serta penanaman lainnya khususnya hasil *monitoring* pasca pelaksanaan dan penanaman sehingga kita secara bersama-sama dapat mengukur tingkat keberhasilannya.

Yang kelima, polusi air dan udara. *Nah*, mohon Ibu bisa menjelaskan dampak negative terhadap kualitas lingkungan air dan kesehatan manusia karena saat ini ada suasana yang sangat panas. Fraksi Gerindra meminta juga agar KLHK juga fokus pada polusi air dan udara baik terhadap pengawasan pabrik, industri, dan eksploitasi seperti pertambangan dan kehutanan. Selain itu, pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, lahan, dan lingkungan juga perlu dilakukan. Suasana yang semakin panas dan terjadinya *el nino* Karhutla di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera Barat mencapai 100 hektar dan di Jawa Timur sudah sekitar 20 hektar merupakan hal serius yang perlu diwaspadai. *Nah*, dengan demikian kami meminta kepada KLHK untuk meningkatkan sistem pemantauan dan deteksi dini tentang kebakaran hutan dengan menggunakan teknologi satelit, *drone*, dan sensor-sensor cuaca yang lebih canggih lagi.

Yang ketujuh, kami menghargai langkah BRGM dalam mengatasi tantangan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sehingga masalah pendanaan tata waktu pelaksanaan dan kendala teknis dapat diatasi

melalui kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, pada target percepatan rehabilitasi mangrove 2021-2024 dengan asumsi anggaran yang tersedia, kami pun meminta agar BRGM menambahkan realisasi capaian targetnya berdasarkan waktu yang dilaporkan sehingga perkembangannya terpantau dan kami bisa mengikuti dengan baik. Kami juga meminta penjelasan bagaimana perkembangan dan pengelolaan desa mandiri gambut setelah dibentuk.

Demikian Ibu dan Bapak sekalian, mohon masukannya dan Ibu Menteri beserta jajarannya bisa memberikan tanggapan kepada kami semua.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Bu Endang.

Saya izin teman-teman sekalian karena masih Fraksi Partai Gerindra, saya izin menambahkan ada 3 poin untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan Bu Endang tadi sedikit ada pembukaan dari Pak Ketua Sudin. Yang pertama, tadi Bu Endang dan Pak Ketua Sudin juga berbicara mengenai kondisi air dan udara, saya nggak tahu Bapak atau Ibu memperhatikan akhir-akhir ini, banyak juga masyarakat yang memperhatikan kondisi khususnya di Ibukota Jakarta yang sangat-sangat mencekam dan memburuk.

Kita ketahui penjelasan-penjelasan dari tahun ke tahun kan itu ada kombinasi dari aktivitas industri apakah itu PLTU, kendaraan umum, dan sebagainya tapi juga mungkin siklus angin yang kita sudah memasuki angin dari timur ya mungkin bisa memperparah kondisi polusi. Tapi, karena kita bicara ini adalah rencana anggaran mungkin untuk 2024 tahun terakhir Bu Menteri dan jajaran KLHK, ya saya minta ini jadi perhatian yang sangat serius. Saya belum pernah melihat adanya studi atau kajian ilmiah yang mendalam yang komprehensif yang disertakan solusi ke depan itu yang seperti apa. Kita bicara ini bukan cuma di Jakarta ya tapi kita mau ini menjadi perhatian untuk daerah-daerah lain yang bisa berpotensi untuk memperparah kondisi udara. Kita melihat banyak sekali antusiasme masyarakat khususnya yang suka olahraga, yang suka beraktifitas di luar tapi sulit sekali saya rasanya kalau kita mau hidup sehat tapi udara di luar itu tidak menunjang. Saya minta Bu Menteri ini ya, entah anggaran Ibu yang terakhir sebelum, *enggak* tahu setelah itu akan kemana tapi saya minta ini ada terobosan dan gagasan dari KLHK, ada studi, ada kajian ilmiah, dan langkah ke depannya apa. Ya, kita tahu lah mungkin ada pengurangan-pengurangan penggunaan, apakah itu kendaraan kendaraan... kendaraan... kendaraan pribadi, lebih ke kendaraan umum, penggunaan lebih banyak kendaraan listrik, dan juga mungkin penanaman-penanaman pembukaan ruang terbuka hijau lebih banyak lagi, penanaman mangrove di sekitar Teluk Jakarta, ini kan bisa menjadi perhatian khusus. Saya minta ini jadi perhatian kita bersama.

Kedua, tadi bicara mengenai potensi untuk pendapatan negara juga. Tadi, Pak Ketua juga sedikit menyentuh salah satu isu yang juga berkembang beberapa tahun terakhir adalah nilai ekonomi karbon. Nah, saya rasa ini penting untuk kita kawal dan pahami bersama perkembangan mengenai potensi ekonomi karbon yang sekarang lagi dikembangkan. Tadi, Pak Ketua sempat menyinggung bahwa sudah ada perusahaan-perusahaan yang menjalankan perdagangan karbon, katanya Pak Ketua sudah banyak. Yang saya ketahui juga banyak masih menunggu, untuk itu nanti saya minta ada penjelasan dari Bu Menteri terkait perkembangan sekarang yaitu posisi pemerintah dan Bu Menteri selaku Menteri KLHK itu seperti apa dan ke depan kira-kira arahan dari pemerintah Presiden Joko Widodo ini inginnya ke arah mana.

Terakhir Bu Menteri karena tadi kita baru juga Rapat Kerja dengan Menteri KKP ada sekilas isu yang menjadi perhatian kami dari Komisi IV juga dan dari masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pemerhati lingkungan. Ini terkait PP 26/2023 tentang sedimentasi laut. Saya ingin tahu dari teman-teman KLHK ini pandangannya seperti apa? karena tidak mungkin KLHK tidak berperan juga dalam menjaga aktivitas ekonomi, aktivitas yang sekarang menjadi pusat perhatian karena mempunyai atau diprediksi bisa memberikan dampak kepada keberlangsungan alam dan lingkungan hidup.

Ini penambahan 3 poin dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

Kita lanjutkan berikut kepada Bapak Ansi Lema dari Fraksi PDI Perjuangan. Silakan Pak Ansi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Baik.

Terima kasih, Pak Budi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan yang saya hormati,
Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan Para Dirjen yang saya hormati,

Bu Menteri, kalau kita lihat progress realisasi ini baru di angka 29,68% belum 30%, Bu Menteri. Kami ingin tahu ini kendalanya dimana? hari ini sudah minggu kedua di bulan Juni dan khusus mengenai Direktorat Jendral PPKL kalau kita lihat PPKL ini anggarannya di KLHK itu terbesar keempat tapi realisasinya masih sangat kecil hanya sebesar 8,9%. Ini apa kendala dan hambatannya?

Yang kedua, Bu Menteri, dalam paparan Ibu Menteri disebutkan bahwa laju deforestasi itu mengalami penurunan. Tentu, ini menggembirakan kami tetapi kami ingin data yang valid dan akurat Bu, dimana saja laju deforestasi itu

mengalami pengurangan dan metode penghitungannya itu seperti apa? dimana kerja-kerja deforestasi yang sudah dilakukan dan terkait dengan hal ini berapa anggaran yang dihabiskan dan capaiannya kira-kira seperti apa, Bu?

Yang berikut Bu, tidak bosan-bosanya saya melihat postur dari anggaran KHLK ini, saya selalu bingung melihat PSLB3 ini anggarannya hanya 274 miliar, Bu. Kalau saya lihat memang bisa disimpulkan antara kehutanan dan lingkungan hidup ini, sepertinya lingkungan hidup ini tidak terlalu penting, yang lebih penting kehutanan. Bisa saja saya salah, Bu, tapi selama hampir 4 tahun saya disini, saya selalu memperhatikan anggaran PSLB3 ini kecil. Di sisi lain, hari-hari ini kita sadar betul bahwa Indonesia ini mengalami darurat sampah, Bu. *Nah*, tolong kami diberikan pencerahan Bu supaya logis memang Indonesia ini darurat sampah tapi layak juga PSLB3 hanya mendapat 274 miliar.

Yang berikut Ibu, terkait dengan kesimpulan rapat yang antara lain menyimpulkan hasil kunjungan kerja kami sekitar 3, 4 bulan lalu ke Kepulauan Riau terkait dengan privatisasi Taman Buru untuk kepentingan investasi atau aktivitas ekonomi oleh perusahaan tertentu dan terkait dengan penggunaan mangrove yang kemudian diolah menjadi arang. Kami ingin mendapatkan penjelasan terutama dari Pak Dirjen Gakkum, Pak Roy, kita kemarin sudah turun Pak lalu tindakan hukum dan sanksinya ini terhadap mereka yang melanggar ini apa? karena kalau misalnya tidak tegas, justru ini akan menjadi justifikasi bagi para pelanggar hukum untuk terus melakukan pelanggaran di lapangan.

Yang berikut, terkait dengan kasus pembuangan *tailing* di Kabupaten Obi, Halmahera Selatan, Bu. Ini masyarakat sudah menyampaikan protesnya karena merugikan kondisi komunitas masyarakat disana dan juga mencemari ekosistem perairan dalam hal ini laut. *Nah*, kami ingin mendapatkan penjelasan dan gambaran dari KLHK, pengawasannya seperti apa? kalau sudah melanggar tindakan hukumnya itu seperti apa?

Yang berikut, terkait dengan prioritas nasional LHK tahun 2024 di materi pemaparan halaman 26, Bu. Disitu disebutkan prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Lalu, ada kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan yang diderivasi terkait dengan 100 titik mata air yang dipulihkan, 480 bangunan pengendalian kerusakan perairan darat, 40 layanan perizinan, 15 danau dan segmen sungai, 15 destinasi wisata. Kami ingin dapat gambaran konkret, Bu, sebarannya dimana? anggaran masing-masing item ini berapa? dan apa yang mau dilakukan? Misalnya, 480 bangunan pengendali kerusakan perairan darat itu yang mau dibangun apa disitu? yang mau dikerjakan apa disitu, Bu? Lalu, titik mata air yang mau dipulihkan itu apa? apakah kalau sudah dipulihkan? lalu dampak buat komunitas disitu dan lingkungan disitu kira-kira seperti apa?

Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Pak Ansi.
Selanjutnya, Bu Alien Mus, Fraksi Partai Golkar.

F-PG (ALIEN MUS):

Baik, terima kasih.

Ketua, Pimpinan yang saya hormati,
Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri dan jajaran Eselon I nya,
Beberapa Direktur yang juga menjadi mitra Komisi IV DPR RI,
Bapak-Ibu semua yang ikut serta dalam rapat kerja hari ini yang saya banggakan,

Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanu Wa Ta'ala. Bu Menteri, saya langsung saja karena memang tadi sudah banyak paparannya. Saya secara pribadi mewakili Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Kementerian KLHK karena salah satu kementerian yang memberikan paparan penyerapan anggaran tahun 2023. Ini kita bisa mengetahui agar kita bisa mengevaluasi sebenarnya kinerja dari Eselon I dan juga kegiatan-kegiatan program tahun 2023, apa saja yang bisa dijalankan, apa saja yang bisa dipertahankan, apa saja yang bisa diteruskan di tahun 2024.

Kemudian Bu Menteri, karena sudah dimasukkan ke *highlight* pembangunan KLHK 2024 untuk mendukung prioritas nasional, saya lihat di sini di paparan halaman 29. Saya tidak mau banyak panjang lebar lagi, Bu Menteri, karena banyak hal yang perlu kita lihat dengan batasan anggaran KLHK ini prioritas anggarannya sebenarnya kemana saja. Tadi sudah disinggung oleh Kakak Ansi ada beberapa Dirjen yang melebihi anggaran dari Dirjen-Dirjen yang lainnya berdasarkan apa? Itu saja alasannya, Bu, terus kita sesuaikan dengan penyerapan di tahun 2023.

Saya lanjut saja karena ini kausuistis. Bu Menteri memang kemarin dan juga beberapa Anggota Komisi IV sudah mendapat juga dan pernah sempat kirim ke saya berita tentang... silakan Mas, mungkin masuk... jangan begitu, bisa-bisa saya dipindahin dari Komisi IV. Jadi, Bu Menteri, tadi sempat menyinggung soal lingkungan, Pak Pimpinan juga sudah menyinggung soal keadaan udara juga wilayah, di udara. Di Maluku Utara, Bu Menteri, Halmahera Selatan di Pulau Obi, disana ada pembuangan *tailing* yang dilakukan oleh salah satu perusahaan Harita Group dengan membuang *tailing* langsung ke laut yang merugikan masyarakat Pulau Obi. Kalau *enggak* salah juga laporan ini sudah dilaporkan ke Komisi IV ya Ketua ya? Kalau *enggak* salah sudah ada surat yang masuk ke Komisi IV. Terus saya cuman...

KETUA RAPAT:

Kalau yang Harita saya *enggak* tahu. Kalau yang Freeport iya, yang waktu itu Pak Dedi akan kunjungan tetapi batal.

F-PG (ALIEN MUS, S.H):

Oh iya, mungkin belum nyampe aja kali ya tapi suratnya mereka sudah kirim ke Komisi IV juga. Jadi, ini yang saya harap agar KLHK benar-benar mampu melakukan tugasnya dan fungsinya dalam rangka ini adalah pengawasan daerah-daerah lingkaran tambang itu dengan pembuangan *tailing* nya. Ini saya minta dengan sangat Bu Menteri, karena ini daerah saya. Jangan sampai saya dibilang hanya bersuara untuk daerah-daerah yang lain padahal daerah sendiri tidak diperhatikan. Saya juga mendapatkan surat dari masyarakat, mereka juga menyampaikan hal yang sama dan ini sangat-sangat merugikan masyarakat.

Kemudian, di luar dari itu saya juga ingin menyampaikan juga tentang *report* yang sering kita suarakan tentang freeport, Bu Menteri. Saya *enggak* tahu *nih progress* ke depan karena kemarin waktu kita rapat, Bu Vivien *enggak* ada ya. Bu Vivien, waktu itu diwakili oleh salah satu SesDirjen. Tapi saya juga ingin menanyakan bagaimana perkembangan *nih* di sana. Karena kemarin nih Bu Menteri, mereka juga mengadakan audiensi rapat bersama dengan DPD RI. Kalau seandainya ini tidak betul kan berarti ini mereka tidak bisa sampai kesana kesini, pasti katanya juga surat mereka sudah sampai ke Pak Presiden, mereka menyurati langsung ke Pak Presiden. Di Komisi IV ini sudah seringkali mengutarakan dan menyampaikan. Saya harap ini juga menjadi atensi dari Kementerian KLHK.

Kemudian, kita masuk dalam situasi alam ke depan Bu Menteri. Saya kemarin baca salah satu berita bahwa Sumatera itu sudah ada titik lokasi yang akan menjad titik yang akan *hot spot* ya? Saya kurang ini. Jadi, masa' ini menjadi salah satu rutinitas tahunan, tidak ada *action* yang kita harus bisa Bu Menteri, apa *kek* sistemnya yang benar-benar *hot spot* itu sudah teridentifikasi sejauh mungkin misalkan? apa langkah-langkahnya kalau mungkin ini tidak bisa dibebankan ke KLHK? mungkin bisa dibebankan ke KL-KL yang lain misalkan karena ini pasti ada hubungannya juga dengan KL-KL yang lain. Jadi, ini tolong lah ini kita harus perhatikan.

Saya sering sekali menyampaikan Bu Menteri, keindahan Gunung Leuser itu walaupun saya bukan orang Aceh *nih*, sama dengan di samping kanan saya, orang Aceh. Saya sering kesana dan saya merasa bahwa keindahan alamnya itu memang pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling luar biasa dan kita harus memberikan atensi dari Kementerian KLHK. Dalam hal ini apapun itu tugas taman nasional bukan hanya kita jaga aja, bukan hanya kita melihat saja tetapi bagaimana menjaga kelestarian disana termasuk juga Gunung Rinjani, Bu Menteri. Sampah-sampahnya di atas itu aduh luar biasa, apakah KLHK juga ngecek sampai disana? Saya juga *enggak* tahu kalau ngecek pasti tahu lah suasana disana seperti apa.

Itu saja dulu, Ketua, nanti kita mendengar penjelasan langsung dari Ibu Menteri.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Bu Alien.

Kita lanjutkan Bu Yessy Melania, Fraksi Partai Nasdem.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati, Bu Menteri beserta jajaran dan para Dirut yang hari ini juga hadir, semoga sehat semuanya.

Yang pertama, tentu kami memberikan apresiasi atas pencapaian-pencapaian yang tadi sudah diberikan *report* langsung oleh Ibu Menteri terkait beberapa hal yang pertama pertumbuhan PDB, kapasitas kelompok tani hutan, kemudian ekspor dari produk-produk lingkup KLHK yang juga terus meningkat. Tentu ini adalah salah satu keseriusan komitmen untuk memastikan bahwa pilar dari lingkungan, ekonomi, dan sosial juga terus terbaiki dengan positif dari tahun ke tahun. Terkait deforestasi juga, kami menyambut baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi data dari 2014 sampai saat ini terus mengalami penurunan dan tentu pada kesempatan ini juga kami terus mengingatkan kepada kita bersama bahwa saat ini kondisi lingkungan kita, cuaca memang tidak baik *el nino* juga di depan mata kita dan kami ingin mendengar tanggapan dari Bu Menteri dan jajaran di KLHK terhadap fenomena ini yang akan terjadi ke depan. Dan salah satunya juga kami menggaris bawahi terkait Karhutla. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri secara lebih konkret bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan cuaca yang juga terus terjadi salah satunya juga mungkin modifikasi cuaca, kemudian di beberapa provinsi yang rawan muncul *hot spot* juga sudah mulai diberikan *standby* pesawat ada 15 unit tadi kalau tidak salah saya dengan dan kami berterima kasih untuk itu. Kami berharap semua kementerian lembaga sektor terkait yang seharusnya bergandeng tangan untuk menyadarkan kita semua bahwa ini kebutuhan kita bersama dan kesadaran kita terhadap lingkungan terutama untuk mengantisipasi Karhutla. Karena kami tahu betul kalau ini bukan hanya domain pribadi dari KLHK, ini perlu sinergitas dari seluruh kementerian lembaga terkait untuk menangani ini.

Kemudian yang kedua juga, Fraksi Nasdem mempertanyakan kepada KLHK tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Budi terkait dengan PP 26 Tahun 2023, itu seperti apa pengawasan dan implementasi mungkin ke depan yang akan dilakukan KLHK dan kami ingin mendengar pemaparan dari Ibu Menteri karena ini juga termasuk kementerian lembaga terkait yang cukup urgensi saya

pikir karena terkait dengan wilayah konservasi juga dan terkait mangrove juga mungkin di laut atau di pesisir pantai kita. Dan yang terakhir, saya ingin menanyakan terkait pagu anggaran 2024. Memang kalau kita lihat Dirjen KSDAE ini juga cukup besar bukan lagi cukup besar tapi memang terbesar dari semua Eselon I dan di lapangan saya cenderung mendengar *report* dari para Balai Taman Nasional, ini mengatakan bahwa dukungan anggaran terkait operasional mereka juga masih sangat minim salah satunya di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang wilayahnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ini luasnya juga cukup besar dan anggarannya justru paling terkecil. Kami menanyakan indikator untuk penentuan anggaran ini apa saja dan kalau dilihat semua taman nasional ini punya potensi untuk bisa dikembangkan contohnya tadi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, kami pernah berdiskusi bahwa di setengah hektar saja mereka bisa menemukan paling tidak 300 spesies unggulan endemik juga yang bisa dikembangkan ke depan. Jadi saya pikir kalau ada penguatan anggaran yang lebih memadai dan siap untuk itu tentu taman nasional ini juga akan memberikan manfaat dari masyarakat sekitar kawasan itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua dan Ibu Menteri yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (BUDISATRIO DJIWANDONO/ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Bu Yessy.

Kita lanjutkan berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat, Ibu Hj. Nur'aeni. Silakan Bu.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan beserta Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri, Pak Sekjen beserta jajaran Dirjen,
Kepala BRGM beserta para Dirut mitra kami,

Sebelumnya, kami mengevaluasi terlebih dahulu dari *progress* realisasi anggaran tahun 2023 dimana dari beberapa Dirjen, salah satunya Dirjen PPKL memang paling terendah di antara yang lain hanya mampu menyerap 8,90% dimana PPKL ini kan punya peran fungsinya yang luar biasa, bagaimana penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir laut. Penanggulangan yang lain juga ini harus diperhatikan, akan tetapi sayang sekali ini ya hanya 8,90%. Apa penyebab dari semuanya? Di samping itu juga ada BRGM hanya

mampu baru menyerap 17,70%, sama ini juga mohon penjelasannya mengapa tidak mampu terserap secara signifikan.

Yang ketiga, ada PSLB3. Sebetulnya PSLB3 ini sangat strategis sekali apalagi di saat sekarang ini kaitan perubahan iklim di samping itu Indonesia darurat sampah. Ini kaitan dengan penanganan sampah, penyediaan infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah, pengurangan sampah. Ini juga sebetulnya menjadi tugas berat dari PSLB3 tapi serapannya baru berapa persen, baru 23% dari beberapa Dirjen yang ada. *Nah*, mohon penjelasan.

Kaitan dengan komposisi anggaran tahun 2024. Kita tahu ini bahwa pagu anggaran Kementerian LHK ini belum sepenuhnya berpihak, kecenderungannya tiap tahun ini semakin mengalami penurunan dan di tahun 2024, Dirjen KLHK mendapatkan kurang lebih 7,53 triliun, ini kan tergolong kecil dimana kalau dirata-ratakan masih di bawah 1% dari RAPBN 2024. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan pada Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut untuk terus memprioritaskan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Penyerapan anggaran agar terdistribusi secara optimal sejak awal tahun sehingga transformasi perekonomian sektor kehutanan dan lingkungan hidup semakin meningkat. Adapun kaitan rencana pendapatan tahun 2024 sebesar 6,746 triliun ini lebih besar 28% dari tahun sebelumnya. Yang ingin kami tanyakan berapa besar realisasi yang sudah terserap oleh Kementerian LHK pada tahun 2023? Apa strategi yang akan dilakukan oleh Bu Menteri untuk mencapai target PNPB tahun 2024 sebesar 6,746 triliun ini.

PNBP dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan seharusnya dikembalikan untuk melaksanakan program pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun target capaian indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH tahun 2024 sebesar 69,74 poin lebih rendah dari realisasi ILKH tahun 2022 sebesar 72,42 poin. Mengapa target ILKH 2024 ini lebih rendah dari capaian tahun 2022? Apakah KLHK meyakini bahwa akan terjadi kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah pada tahun 2024? Kementerian LHK berkomitmen untuk menyalurkan kegiatan berbasis masyarakat pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar 1,752 triliun lebih besar dari tahun 2023 yang hanya sebesar 1,674 triliun. Bagaimana mekanisme penyaluran dari program tersebut, monitoring, dan pengawasan kegiatan berbasis masyarakat seperti apa? Sasaran utama KLHK pada tahun 2024 menjaga pertumbuhan PDB secara positif dan menumbuhkan ekspor hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, KLHK harus selalu mengedepankan prinsip ekologi sehingga hutan kita tetap terjaga dan terus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi negara dalam jangka panjang dengan menindak tegas segala macam kegiatan penggunaan kawasan hutan non prosedural.

Rencana penarikan hibah luar negeri tahun 2024 sebesar Rp200 miliar lebih rendah daripada tahun 2023, seperti apa mekanisme penarikan hibah?

Dari lembaga pendonor mana saja hibah luar negeri tahun 2024 berasal? Untuk BRGM, target nasional rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024 yaitu seluas 600.000 hektar di 9 provinsi yang sampai saat ini dari total target 600.000 hektar yang sudah teralisasi baru 6,93% atau kurang lebih 41,6 hektaran. Pertanyaannya kenapa gitu sangat rendah? Apa kendala di lapangan dan serta strategi BRGM seperti apa untuk bisa mencapai target rehabilitasi 600.000 hektar mangrove sampai dengan tahun 2024 dengan dukungan anggaran terbatas ini.

Yang terakhir, bahwa KLHK akan mendukung untuk kegiatan program prioritas nasional dua dalam mendukung penataan Ibukota negara kurang lebih 500 hektar, kegiatannya adalah rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya, 700 hektar pemulihan ekosistem di area IKN, 68 hektar keanekaragaman hayati tinggi. Pertanyaannya dari beberapa dukungan yang sudah disebutkan, kira-kira jenis tanaman apa serta memakan waktu berapa lama dengan kondisi anggaran yang minim seperti ini? Apakah akan terealisasi dukungan ke arah percepatan penataan Ibukota negara. Dan kami juga meminta indikator kinerja utama 2024 mengingat perubahan iklim kita sudah rasakan panasnya matahari yang cukup menimbulkan mungkin debu-debu yang berserakan, ini mohon kiranya pilar lingkungan ini harus diperkuat. Di sampingitu juga, indeks kinerja pengelolaan sampah dimana hanya 70 poin yang disampaikan kepada kami ini parameternya seperti apa sementara PSLB3 saja menyerap anggarannya masih rendah.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Makasih, Bu Nur.

Berikut Pak Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS. Silakan, Pak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri,
Jajaran Eselon I, dan
Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Yang pertama Pimpinan, saya bicara tentang masalah anggaran karena kita bicara pagu indikatif 2024. Bu Menteri, saya pribadi dan Fraksi PKS miris melihat apa ini anggaran kita Bu ya. Dilihat dari kebutuhan kita, Bu, kebutuhan kita untuk perbaikan hutan kita, perbaikan lingkungan hidup sangat banyak.

Dilihat dari kontribusi LHK yang luar biasa, PNBP kita 6,7 triliun ya, 6,7 triliun hampir sama dengan anggaran kita 7, 53 triliun. Ini saya kira ini 3 hal yang harusnya menjadi penyebab sehingga anggaran kita naik, Bu ya. Ini teman-teman di KSDAE ini penjagaan hutan banyak yang tidak termaksimal dijaga karena anggaran sangat terbatas, begitupun di masalah limbah dan lain-lain. Jadi itu ya Bu, itu yang pertama. Tapi, masih ada waktu Bu Menteri untuk masuk ke pagu anggaran apalagi nanti masuk ke lokasi anggaran nanti untuk penambahan, Bu. Ini *enggak* bisa kalau seperti ini karena sekali lagi kebutuhan kita sangat banyak dan kontribusi yang luar biasa. Kita melihat Ibu hanya ditambah anggarannya hanya 174 miliar dari anggaran 2023, sangat kecil sekali. Kita berharap ya penambahannya ya 1 triliun lah minimal karena PNBP naiknya 28,7% kenaikan PNBP. Ini saya kira perlu *public* melihat bahwa pemerintah negara itu harusnya betul-betul perhatian dan fokus terhadap LHK ini sebagai pusat daripada kehidupan kita.

Nah, Bu Menteri, di sisi lain juga kita melihat indeks yang lain juga cukup bagus ya kita berikan apresiasi, indeks lingkungan hidup kita naik ya. Namun, Bu Menteri, ada beberapa hal yang perlu perhatian khusus, Bu, fokus kepada daerah-daerah tambah. *Nah*, Bu, kami ini di Komisi IV bersama dengan Pak Dirjen ini Pak Roy ya, keliling ke beberapa daerah tambang, daerah perkebunan. Kita melihat bahwa ternyata daerah tambang ini banyak masalahnya, Bu. Pertama, dia kan menggunakan kawasan hutan kita tanpa membayar atau mungkin belum membayar. Yang kedua, kerusakan lingkungan Bu di Konawe Utara ya, Bu Alien ya, kita pernah ke sana Konawe Utara, melihat Bu, masyarakat dapat sampahnya, uangnya ya pengusaha yang dapat. Masalah tambang apa namanya nikel di Konawe Utara atau mungkin kita baca juga aspirasi masyarakat di media Pulau Obi, Halmahera Selatan tambang PT Harita ya atau di Maluku di Papua kita lihat Freeport. *Nah*, ini kedepannya, Bu Menteri, perlu penguatan pengawasan, Bu. *Nah*, ini Pak Roy dan jajarannya harus tegas ini, kalau memang kita ingin memperkuat pengawasan kita ya mungkin perlu diperkuat anggarannya juga. Anggaran pengawasan kita perlu diperkuat sehingga tidak tergoda dengan rayuan daripada oknum yang seperti yang saya katakan tadi, Bu ya, dan betul-betul bisa menyampaikan, apa namanya, melaksanakan, menegakkan hukum secara tegas. Ya, jadi kita ingin kasus pembuangan limbah ke laut *tailing* ya dan lain-lain ini menjadi perhatian Bu karena sekali lagi yang menderita adalah rakyat kecil kita.

Kemudian, kita melihat bahwa ada sumber PNBP tadi dikatakan baru 4 sumber ya, Bu, PNBP kita. *Nah*, saya mungkin bisa menyarankan penguatan sumber PNBP dari Gakkum ini, Bu. Tadi kami Rapat Kerja dengan Kementerian KKP ternyata PNBP-nya ini mengalami kenaikan ratusan miliar itu dari Gakkumnya, dari penegakan hukum, apa Namanya reklamasi. *Nah*, yang menjadi pertanyaan kita ini kan, *nah* reklamasi itu bahannya darimana? dari gunung kah? darimana? harusnya kita ini berharap bahwa Gakkum disini ataupun ada PNBP kontribusi kepada Kementerian LHK gitu ya. Itu reklamasi Bu Menteri ya, kita berharap ada disini juga termasuk penegakan hukumnya, Pak Roy. Ini harus *clear* ini Pak sehingga pengusaha ini jangan keenakan ini, yang nakal ya tentunya ya bukan investor yang baik tapi yang nakal. Apalagi yang tidak membayar izin pinjam kawasan hutan. Ini saya kira harus segera ditindak tegas dicabut secara perdata dan dihukum secara pidana. Ini saya kira

perlu dan mungkin nanti ada *report* dari Bu Menteri seperti apa kira-kira, termasuk juga piutang ya Bu ya, perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini yang sudah menggunakan Kawasan hutan ini, kita ingin mendengarkan *report*-nya seperti apa, pembayaran dendanya gitu ya.

Kemudian, yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas kelompok tani hutan Bu Menteri. Ini saya mendengar tadi laporan sangat bagus cuma mungkin saran saya disambungkan dengan Dapil Anggota, Bu, minimal datanya lah kita tahu sehingga kalau kita berkunjung nanti ke kelompok-kelompok ini kita tahu bahwa ini sudah menerima bantuan dari Kementerian LHK ya, Bu Menteri. Jadi, tolong, berharap ini di balai-balai Dapil Anggota ini jadi bisa tersampaikan kepada kami untuk pengawasan juga sekaligus mencontoh yang baik agar bisa dipublikasi kepada kelompok-kelompok yang lainnya.

Yang terakhir, untuk PP Nomor 26 tentang masalah ekspor pasir *nih* Bu Menteri, kita ingin meminta pendapat dari Kementerian LHK dari segi lingkungan ini sebenarnya gimana *nih* ekspor pasir ini ya kan dan posisi LHK dimana? karena kita tahu bahwa endapan katanya mau diekspor kan endapan sungai ya? Sungai ini kan di bawah pengawasan juga LHK ya daerah aliran sungai.

Saya kira demikian saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Andi.

Kita lanjutkan oh tadi Pak Haerudin mohon waktu dan PKB tidak ada. Bu Emma, ustadz dari Fraksi PPP? tidak ada juga? Ada yang ingin mendalami rekan-rekan sekalian? Hah? Mau? Oh, oke. Bu Kiky, Pak Ravindra sama Pak Soetrisno.

Silakan Bu Kiky.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat sore Bapak-Ibu sekalian,

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tiga menit.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Belum juga ngomong, Ketua, baru nafas *nih*.

Saya cuma apa agak fokus ke masalah yang lagi *happening* gitu, Ibu, kembali lagi masalah PP 26/2023. Walaupun memang *leading*-nya bukan KLHK, oke, kita pahami dulu itu semua bersama hanya yang kami minta penjelasan, ini kan tadi kita rapat dengan KKP itu *guarantee*-nya konservasi laut, ekosistem laut, itu gimana? karena mohon maaf, kemarin saya baca berita ada *statement* KLHK akan awasi pengerukan pasir laut. *Big question mark, how?* Karena apa? BRGM dengan DAS ini mengajukan kembali masalah mangrove. Mangrove itu setahu saya kalau *enggak* berubah ditanamnya di sekitaran pantai yang agak dalam dikit namanya laut kan, gitu? Lebih baik anggaran mangrovenya udah aja dulu kalau mau diekspor. Ya, mohon maaf, saya kan mikirnya rasional aja gitu *loh*, ini saran, namanya bersaran sebagai mitra daripada itu sama aja kalau bahasa kasarnya bakar duit Bapak-Ibu sekalian. *Nah*, ini kenapa? kalau saya tidak mau meminta perspektif tapi saya mau sikapnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam posisinya menjaga garda kehutanan konservasi dan lain-lain. Karena saya tahu kalau pendapat ya boleh saja tapi sikap *dong*, karena apa? Indonesia ini paling cepat dalam menghabiskan potensi-potensi yang dimiliki.

Nah, kemudian, saya pengen tanya, *nah* ini baru tanya. Sedimen, Ibu-Bapak sekalian, itu yang saya pahami kalau saya dulu SD, SMP belajar dari sungai ngalirnya ke laut muaranya. Kenapa *sih enggak* yang di sungai duluan yang kalau bicara sedimen? Mohon maaf *nih* gitu ya karena saya kebetulan *background*-nya hukum, Pak, jadi pakai logika berpikir aja. Mungkin Bapak-Ibu kan insyinyur semua yang lebih memahami, cuma maksud saya kenapa *enggak kok* jadi parsial gitu? apakah pasir itu hanya ada di laut saja? kayak kami punya Sungai Musi itu segede laut dan itu memang karena banyaknya mineral yang di bawah sungai itu akhirnya jatuh berceceran, *nah* saya *enggak* tahu *tuh* jadinya apa. Gitu, itu kedua.

Jadi, saya mohon mungkin ada pendalaman lebih lanjut nanti, Pak Budi, terkait PP ini, karena tadi kami menanyakan Bapak-Ibu sekalian, apakah masih ada ruang untuk memperbaiki PP itu apabila ada masukan dan saran. Jangan sampai UU Nomor 5 Tahun '90 yang mau direvisi oleh Komisi IV menjadi kontra produktif gara-gara PP-nya. Memang *enggak* ada urusan tapi lucu aja kalau bunyi atasnya benar *eh* PP-nya berantakan. Gitu loh maksudnya.

Nah yang ketiga, kemarin yang Kunspek ke Bogor dengan Bapak ya? Saya menjadi penasaran, Pak, mungkin butuh buat diskusi panjang terkait dengan hewan-hewan yang ada di dalam wilayah konservasi kita di seluruh wilayah, itu statusnya itu kan saya pada saat melihat itu kan saya juga diskusi, itu statusnya apa *sih?* terus bagaimana siklus detailnya gitu loh, Pak. Karena

yang namanya hewan itu makhluk hidup harus dirawat dan pada saat saya *enggak* tahu, kalau pada saat dia beranak itu milik siapa? kalau panda nya kita pinjam, kan pengen tahu seperti itu *sih*. Ya saya pengen tahu itu karena penasaran saja karena ini terkait dengan potensi PNBPN dan juga uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kita, gitu loh. Jadi, apa mungkin bahasanya Pak Darori itu dulu biaya konservasi itu seperti apa *sih* gitu?

Mungkin seperti itu, Ketua.

Terima kasih, Pak Budi, mohon maaf lebih dikit dari 3 menit.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih Bu Kiky.

Pak Ravindra, selanjutnya siap-siap Pak Sutrisno setelah itu kita ke Pak Hanan.

F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S):

Siap, terima kasih.

Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya banggakan,
Yang saya hormati Kementerian KLHK beserta jajarannya,
Para Direksi BUMN yang hadir,

Kami pada bulan Mei lalu mendapat tamu dari pemerintah daerah Nias Utara. Disampaikan dan tadi saya juga sudah sampaikan pada pertemuan dengan KKP pada 11 Februari 2023, kapal berbendera Gabon dan membawa sekitar lebih 2.000 ton atau lebih aspal itu berasal dari United Arab Emirates mengalami kebocoran di lambung kapal yang menyebabkan bitumen tersebar ke lautan lepas sekitar kurang lebih 90 kilometer. Ini berdampak kepada pelaku usaha perikanan dan para nelayan di Desa Sihene'asi, Kabupaten Nias Utara. KLHK mengatakan bahwa total kerugian bisa mencapai 120 M. *Nah*, pertanyaan saya apakah mohon... apakah tindak lanjut yang bisa dikerjakan baik dari pihak swasta ataupun dari pihak kementerian untuk menyelesaikan kondisi ini karena nelayan banyak yang sampai saat ini belum bisa berlayar kembali.

Kedua, saya ingin memerhatikan bahwa terkait dengan program ketahanan bencana perubahan iklim dianggarkan 139 M atau sekitar 2% dari anggaran 2024. Mengingat adanya fenomena *el nino* dan *Indian Ocean Dipole* yang semakin menguat pada semester II/2023 dan akan berlanjut pada awal tahun depan, apakah anggaran ini terlalu kecil untuk sebagai metode antisipasi bencana?

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Pak Ravindra.

Berikut Pak Sutrisno, silakan Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Ketua, para rekan-rekan Anggota,
Bu Menteri beserta para pejabat Eselon I dan jajaran,

Langsung Bu Menteri, tentang RKA apa namanya, rencana program anggaran tahun 2024. Ini saya masih ada satu perbedaan kebijakan nampaknya, kita belum lama membahas anggaran 2023. Pada saat itu saya yang menyampaikan bahwa sumber utama anggaran LHK itu adalah dari PNBP tapi di tahun 2024 ini RKA-nya ada 7,5 triliun PNBP-nya hanya 1,6 triliun dari 6,746 triliun. Manakala apa yang berlaku pada saat membentuk RKA tahun 2023 masih berlaku, tentunya dengan masuknya apa namanya rupiah murni anggaran RKA kan harusnya lebih daripada itu. Oleh karena itu, saya mohon, mohon penjelasan ini apakah ada perbedaan? karena masalahnya selalu menjadi acuan apa namanya apa yang berlaku di Kementerian LHK ini, pada saat tadi juga bicara dengan Kementerian KKP agar kita juga mendorong agar PNBP-nya juga sebagai sumber apa namanya dana pada saat penganggaran di Kementerian KKP.

Kemudian yang kedua Bu Menteri, bahwa di rencana 2024 ini memang pemberdayaan masyarakat itu mencapai sekitar 25%, ini sangat luar biasa. Hanya persoalannya kalau kita bandingkan dengan realisasi tahun 2023 ini yang masih di bawah 30%, apalagi dikaitkan dengan target pencapaian indikator makro ekonomi, PDB-nya hanya 3 sampai 4% di 2024 sedangkan di 2022 itu mencapai 5,69%, ini dampak karena keterlambatan pencairan itu berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh aktivitas Kementerian LHK ini juga menjadi menurun. Oleh karena itu, mohon untuk apa Namanya realisasinya ya karena dari 3 mitra kita ini nampaknya yang paling rendah realisasinya baik anggaran aspirasi maupun juga Bimtek ini juga belum ada realisasinya untuk segera bisa direalisasikan.

Kemudian yang ketiga Bu Menteri, walaupun Bu Menteri pernah menjelaskan terkait dengan HGU yang sudah berakhir Bu Menteri, bahwa itu adalah urusan BPN itu kan. Cuma persoalannya pada saat Kunspek kemarin ke Subang itu kan terjadi air bah akibat HGU yang sudah berakhir apa Namanya penggunaannya dialihkan kepada perusahaan swasta, tegakan-tegakannya dihabisin semuanya. Akibatnya, terjadi air bah yang menimpa apa namanya masyarakat sekitar. *Nah*, oleh karena itu, kami mohon penjelasannya terhadap HGU-HGU yang memang sudah berakhir pemanfaatannya, apakah bisa dengan bebas oleh penerima HGU bisa dialihkan kepada orang lain? Mungkin ini pada saat dulu Kementerian LHK apa namanya mencari

permasalahan Hak Guna Usaha ini, karena kalau tidak, ini akan banyak tegakan-tegakan yang nanti dimusnahkan yang berdampak kepada kekurangan tegakan hutan kita.

Kemudian, pemanfaatan lahan apa namanya di hutan yang apa namanya bagi-bagi kegiatan masyarakat. *Nah*, ini juga mohon Bu Menteri perlu ada kejelasan, mereka jangan kemudian menanti dan menanti akhirnya terjadi keributan.

Kami kira itu dari kami.

Terima kasih, Bu... Pak Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Sutrisno, terima kasih.

Kami lanjutkan dulu Pak Hanan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri beserta Pak Wakil Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Pertama, tadi sudah diingatkan oleh Pimpinan, oleh Ketua bahwa 2024 adalah tahun terakhir kita melaksanakan RPJMN untuk 2020-2024. Kalau melihat laporan terkait dengan kinerja, ini ada bagian-bagian yang tidak tercapai dan ada bagian-bagian yang melampaui, Bu. Oleh karena itu, untuk 2024, ini kan kita baru membahas pagu indikatif, pembahasan awal masih dimungkinkan untuk adanya pergeseran-pergeseran untuk mengintervensi program kegiatan yang jauh belum tercapai untuk mengakhiri RPJMN tahun 2024 nantinya. Untuk itu, saya menyarankan untuk *me-review* kembali, mengevaluasi kembali, hal-hal terkait khususnya yang penting adalah masalah deforestasi, degradasi, kemudian kualitas lingkungan hidup dan sebagainya untuk mendapat perhatian intervensi anggaran. Tadi sudah disinggung-singgung, misalnya masalah lingkungan hidup anggarannya masih biasa-biasa saja sedangkan perlu ada target-target yang perlu dikerjar untuk mengakhiri RPJMN 2020-2024.

Kemudian yang kedua, terkait adanya apa namanya harapan atau visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, Bu, 2045. Dalam diskusi-diskusi kajian-kajian untuk mencapai kedaulatan kemandirian pangan, tidak ada pilihan adalah luasan areal tanam. Misalnya saja terkait dengan gula, itu kita tidak mungkin swasembada gula kalau tidak ada perluasan lahan yang cukup memakan lahan yang cukup luas hampir 1 juta hektar, ini pasti menggerus, Bu, menggerus kawasan hutan atau pola-pola seperti apa yang perlu dilaksanakan kedepannya sehingga target-target di luar sektor kehutanan ini bisa terpenuhi

sementara apa namanya fungsi kawasan hutan kita bisa tetap kita pertahankan.

Kemudian yang ketiga Bu, terkait dengan pengukuhan dan tata batas hutan. Kita ketahui Kementerian ATR BPN itu menargetkan di 2024 itu mereka selesai Bu PTSL. Manakala program PTSL selesai, artinya apa? semua kawasan yang berbatasan dan kawasan hutan itu sudah terpetakan di ATR BPN. Oleh karena itu, saya kira perlu percepatan-percepatan terkait dengan pengukuhan dan tata batas.

Kemudian berikutnya yang terakhir, antisipasi, Bu, krisis pangan dunia kemudian kebakaran hutan dan lahan. Ini saya mohon untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesiapsiagaan yang sudah didengungkan selama ini kemungkinan-kemungkinan adanya kemarau Panjang, apakah sarana prasarana dan SDM terkait dengan kesiapsiagaan mengatasi kebakaran itu apakah sudah cukup, belum cukup atau bagaimana? sehingga kita perlu kesiapsiagaan yang lebih baik lagi namun tentunya kita berharap walaupun *el nino* tidak separah yang digambarkan selama ini.

Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Pak Hanan.

Silakan Pak Ihsan.

F-PDIP (M. R IHSAN YUHUS, BA., B.Comm.ME.Con.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi IV,
Ibu Menteri beserta seluruh jajaran,
Direktur Utama Perhutani,

Perkenalkan nama... oh, sorry Pak Kepala Badan Restorasi Gambut.

Perkenalkan nama saya Ihsan Yunus. Saya baru Ibu disini, baru hari ini bisa rapat kerja bersama. Jadi, mungkin pengetahuannya belum terlalu dalam. Nama saya Ihsan Yunus, Anggota DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Dapil-nya Jambi, 11 kabupaten kota.

Ibu-Bapak yang saya hormati,

Pertama, saya ingin mengoreksi sedikit mengenai pemaparan dari Bu Menteri, saya usul supaya kalau misalnya kita bicara angka, anggaran, itu mungkin ada bagusnya disandingkan, Ibu, jadi nggak terpisah-pisah halamannya. Kalau yang sebelumnya dengan Kementerian KKP itu, kita bisa lihat anggaran tahun lalu seperti apa, anggaran tahun ini seperti apa, naik turunnya seperti apa, per program seperti apa, per Dirjen seperti apa. Jadi, kita akan bisa paham *oh* ini ada perubahan-perubahan fokus program atau ada perubahan penekanan anggaran ada dimana. Itu yang kita sebut biasanya politik anggaran, Bu Menteri. Jadi, supaya kita bisa sama-sama lihat dan kira-kira kalau pun mau diusulkan, diperjuangkan ditambah itu mau dimana.

Kalau kita lihat *highlight* dari Kementerian, *nih* makanya saya bingung *nih* muter-muter. Indikator kinerja utama 2024, disini Bu Menteri memaparkan yang paling awal kalau misalnya pilar lingkungan berarti aksentuasinya, penekanannya di pilar lingkungan ya, Bu ya, kalau urut-urutannya. Kalau sesuai nomor urut Bu ya? *nah*, sesuai nomor urut. Jadi pilar lingkungan di 69,74 maka kami melihat bahwa KLHK memang sangat peduli terhadap indeks kualitas lingkungan hidup.

Salah satu yang menentukan baik tidaknya indeks kualitas lingkungan hidup adalah udara yang kita hirup, udara yang sehari-hari menjadi sumber kehidupan kita yang kita hirup, yang saat ini sangat bermasalah terutama di Indonesia. Maka, saya ingin mempertanyakan adanya Permen yang berubah dari tahun 2008 ke 2019 tentang baku mutu NOx pada mesin genset yang tadinya sudah sesuai dengan pemerintah, komitmen pemerintah menentukan baku mutu tapi kemudian berubah menjadi Permen yang baru Nomor 11 Tahun 2021, tidak ada lagi per apa ... per-limitan ini, Bu Menteri. Tolong kami dijelaskan kenapa kemudian diubah yang tadinya sudah baik dibuat standarnya karena memang kita sangat menghindari dan kita akan segera alih energi dari mesin genset ke mungkin bisa energi baru terbarukan dan mungkin kita kembali lagi ke sumber energi yang memang sedikit emisinya agar kita mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama di *agreement G-20* di Paris, itu yang pertama.

Yang kedua, tentunya karena saya dari Jambi, Bu, kemarin kami sudah bincang-bincang dengan Badan Restorasi Gambut di Jambi itu banyak sekali hutan mangrove dan gambut yang terbengkalai karena memang tidak ada anggarannya. Hutannya luas tapi sosialisasi ke penduduk juga kurang dan penjaganya *enggak* ada sehingga dicopet terus Bu, diambil mangrovenya, diambil bakaunya. *Nah*, ini menjadi masalah dan kita tidak bisa jaga itu.

Yang kedua, permasalahan kebun kelapa sawit yang di Jambi sampai sekarang juga masih banyak yang terbengkalai belum selesai dan ini kami undang dan Insya Allah ini nanti Komisi IV dan saya dengar-dengar ini, Pak Ketua, ada rencana mau ke Jambi. Jadi, saya usul salah satu agendanya adalah kita melihat juga menginventarisir masalah-masalah kebun sawit dan karet yang mungkin tumpang tindih dengan hutan, mungkin juga bermasalah dengan hukum agar bisa kita tertibkan semuanya, walaupun sekarang sawit

sama karet harganya lagi turun. Jadi, untuk hidup saja petani-petani itu sudah sulit apalagi pupuknya juga jarang.

Saya rasa itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas waktunya.

Wallahul mufawiq ila aqwamit thoriq.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak-Ibu sekalian,

Silakan kalau masih ada lagi, kami... Pak Endro, setelah Pak Endro ada lagi? cukup? oke, Pak Endro terakhir.

F-P. GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO M.B.A.):

Terima kasih, Pak Ketua atas waktunya.

Pak Ketua yang kami hormati,

Bu Menteri beserta jajarannya yang sangat saya hormati,

Pertama, saya apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi tentang pencapaian pembangunan KLHK. Kemudian, juga rencana-rencananya dan sebagainya ini. Tetapi, ada satu yang cukup mungkin penjelasan juga, Bu, tentang laju deforestasi dan degradasi hutan yang ada di halaman 10 ini. Memang melihat data itu fluktuatif sekali ya, Bu, tapi apakah ini juga bisa dikatakan suatu keberhasilan karena tahun '99 sampai '20 tinggi sekali lagi. Kemudian tahun 2014 sampai 2015 ada kenaikan dan sekarang ini menjadi landai di tahun 2000. *Nah*, permasalahannya ini memang keberhasilan dari KLHK ini atau memang yang digunduli sudah *enggak* ada? Contohnya adalah kalau di Jawa memang yang digunduli sudah *enggak* ada, jadi tentunya menjadi menurun. Kalau mungkin di luar Jawa itu dengan (*suara tidak jelas*) mohon dijelaskan, Bu.

Kemudian juga yang kedua, yang perlu kami soroti juga mungkin masalah kunjungan ke Tiongkok yang ada kaitannya dengan pelestarian hewan dan sebagainya itu. Ternyata Bu, disana ini saat-saat ramai wisata seperti kebun binatang itu adalah pada hari Senin sampai Ju'mat. Beda sekali dengan yang ada di sini, di sini itu ramainya itu pasti Sabtu dan minggu. *Nah*, ini kayaknya Bu yang kami amati dan juga kami dengar dari beberapa orang sana yaitu di sana tidak ada ego sektoral di antara kementerian. Contohnya adalah di sana ini kenapa banyak, ternyata pihak-pihak yang ada pengelola program pemerintah khususnya juga kebun binatang ini kerja sama dengan Kementerian Pendidikan yang jumlahnya banyak sehingga banyak. Coba kalau kita terapkan bahwa KLHK ini bisa bersinergi dengan Pendidikan, anak-anak didik *tuh* banyak sekali jumlahnya. Entah nantinya bagaimana sistemnya atau ada anggaran yang dimasukkan dari Pendidikan kemudian anggaran itu

nantinya untuk bayar gratis dalam hal ini dan sebagainya, ini menjadi salah satu contoh sehingga tempat wisata yang diprogram oleh pemerintah untuk pelestarian dan sebagainya bisa kembang dengan baik tanpa kembang kempis terhadap pendanaan karena ada sinergitas antar kementerian.

Saya kira dua hal itu, Bu, yang saya perlu kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, izin nambah dikit, boleh? Dikit banget, Pak Budi, dikit.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan, Bu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Aduh, untung ganteng.

Tadi saya mengingat karena tadi ada dua hal yang pertama Ibu Alien bicara *hot spot*. Saya minta tolong ini mungkin Pak Ihsan juga, Pak Budi juga sebenarnya kurang lebih wilayahnya kurang lebih, Yessy juga konturnya sama. Saya *enggak* yakin itu *nyiram water bombing* itu solutif, Bu, ya. Tolong mungkinantisipasi itu sudah zamannya maju kok masih *water bombing*, maksud saya apa *sih* antisipasinya kayak waktu itu Pak Ruwanda pernah menjelaskan masalah gambut itu dimatiin disini tetap aja akan mengalir, itu mungkin apa gitu, masa' ada titik permasalahan tapi tidak bisa ada solusi kan, *enggak* mungkin juga gitu.

Kedua, tadi yang saya juga Pak Ihsan, Pak Ihsan Yunus sampaikan Pak Roy sengketa perkebunan, sengketa tambang kemarin baru juga terjadi lagi tambang-tambang illegal di Kabupaten Muba yang baru saja berdampak besar itu sampai di perbatasan. Saya *enggak* tahu apa memang tidak bisa ditindak tegas atau ada U dibalik B, ya terserah lah mau udang di balik batu, batu di balik udang terserah lah Pak Roy ya. Tapi, maksud saya, saya jelas disini disampaikan beberapa kali saya sampaikan beberapa perkebunan contohnya yang memang tidak melakukan selayaknya apa yang harus mereka lakukan dan konflik berkepanjangan dengan Masyarakat, mohon ditindak tegas, Pak. Saya sebut saja merk nya ya, apa Juanda Sawit, Sinarmas, MHP, siapa lagi ya, siapa lah itu lah pokoknya. Saya rasa sama namanya karena Sumbagsel itu besar dan sama orangnya itu-itu juga, giti. Jadi, kami harap kami juga kalau ada orang-orang kami yang pada akhirnya tidak ini ya silakan dilakukan penegakan hukumnya gitu loh selama itu memang tidak berkesesuaian.

Jadi, kami harap Pak Roy, Ibu Menteri, ini menjadi atensi, Bu, karena kami dianggap tidak pernah menyuarakan katanya. *Nah*, ini saya barusan ngobrol dengan Pak Darori memang susah juga karena nanti ATR BPN nya *enggak* mau ngobrol bareng, ya kan. Kebetulan Pak Ihsan ini pernah di Komisi II, kami pernah diskusi apa sih sebenarnya kendalanya gitu loh, *kok enggak* bisa duduk bareng, gitu.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, sebagai penutup apakah bisa?

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Boleh, kalau Bang Salim kita silakan kapan pun, Bang Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Makasih, Pak Ketua.

Bu Menteri, Pak Wamen, dan kawan-kawan yang kami hormati,

Habis ini habis dulu Ketua, *enggak* usah lama-lama.

Pertama, tadi menyimak apa dikatakan Pimpinan Komisi IV, Mba Kiky yang tidak pernah, seolah-olah kita tidak pernah menyuarakan suara rakyat yang diwakilkan kepada kita. Sebenarnya Bu Menteri, saya malu, Bu. Periode ini saja sudah tahun ke-empat, dari 5 miliar anggaran Ibu sudah sampai 7 miliar *eh* triliun, tinggal tambahkan nol, Pak, *enggak* ada ketawa-ketawanya dari tadi ini, sampai sudah 7 triliun, Bu. Saya memang berusaha *nggak* berbicara tadi Bu, cuma karena Ibu Kiky tadi katakan kita suarakan pun belum tentu, saya malu Bu, 7 triliun koma sekian itu pun sampai hati Ibu tidak yang setiap hampir setiap tahun yang saya suarakan banyaknya aset-aset Ibu di daerah kami, Taman Nasional Gunung Leuser tidak menganggarkan seribu rupiah pun mungkin, Bu. Kalau janji, PHP, saya kira sudah terbiasa mungkin ini yang terakhir, Bu, kita apakan karena Pak Sekjen pun sudah kesana. Bangunan di sana sudah semenjak tahun '82 Pak Wamen. Kalau Ibu Menteri mungkin tidak mendengar, semua saya serahkan ke Pak Wamen saja. Selamat datang Bu Cakep, saya lagi merayu Bu Menteri, Bu. Artinya apa Bu? kalau cerita taman nasional itu Ibu tahu persis, memang ini mungkin ada kemudahan Pak Sekjen, itu pun saya dengar melalui kepala balai hanya 1 miliar, *enggak* usah Pak Sekjen. Dari 7 triliun, saya *nih* *nggak* mau ribut-ribut *ndak*, saya *ndak* pernah ribut-ribut. Cuman ya sekedar menyampaikan ini pun penyampaian terakhir, untuk apa kita selamatkan hutan? kalau *ndak* nanti kita suruh babat hutan tuh Bu, katanya paru-paru dunia. Masyarakat di situ *enggak* ada perhatian apapun saya bilang, nanti mungkin ada bohongnya, makanya 7 triliun bangga kita.

Namun sudah tahun ke-empat *nih*, saya pun sudah enam tahun disini Bu, mau tujuh kalau terpilih lagi, *Alhamdulillah*. Ini sekedar masukan Bu, kalau kena PHP, sama-sama Pak Budi, kita selalu di PHP cewek, cuma *enggak* jadi-jadi. Cuma kalau tahun ini nanti ya Syukur, itu pun saya lihat Ibu Menteri sama Pak Sekjen lagi diskusi, berapa kita kasih bilangannya. Cuma ya terserah Bu, *enggak* ada masalah itu Bu, cuma ingat padahal orang dari Aceh itu ada satu direktur di belakang sana cuma *enggak* ada yang ingat kampungnya. Pak Sahid itu kan orang Aceh kami tuh, apa itu Bu Vivien, Ses Bu Vivien kan, itu pun sama juga *tuh* Bu orang Aceh kami, *enggak* ada lebih kasihnya. Kami mohon perhatian aja, Bu. Mungkin saya dengar dari kepala balai, ada 1 miliar yang mau dikasih tempat parkir, padahal itu, Bu, bangunan tahun '82 sudah ada, seumuran Bu Kiky sudah jadi Anggota DPR, Bu, Pak Roy ini untung Pak Sudin *enggak* masuk, kalau Pak Sudin masuk kena hajar lagi, tadi disuruh Pak Ansi cuma suruh ngajarnya kan.

Yang kedua, Bu, masalah PNBP. Saya kira kalau mau menaikkan ini luar biasa, Bu, ada yang kena-kena denda itu kutip aja uangnya apa? Tinggal regulasinya aja diatur tidak boleh di luar aturan. Contoh di Aceh, saya sudah diskusi juga, Bu, mungkin sudah sampai ke meja Ibu juga, Pak Sekjen, Pak Roy juga. Ada satu perusahaan dia secara pidana sudah dihukum, sudah menjalankan hukuman, duit pun sudah dibayar, secara perdata dia kena 140 sekian miliar, Bu. Namun, dia minta keringanan untuk mengangsur mungkin dalam sekian waktu. Kalau ditanya nanti ke Gakkum ini peraturannya, ditanya sana. Kalau saya singkat-singkat saja *tuh*, kalau untuk menghasilkan negara, kalau bisa diperlancar untuk apa dipersulit? Sepanjang di dalam aturan, mereka, Pak Wamen, mau mereka bayar, cuma mereka minta pengurangan dari 140 miliar, berapa bisa kurang? Kalau pun tidak bisa kurang minta pengurangan mungkin cicilan. Ini satu kasus, coba bayangkan di seluruh Indonesia, lebih-lebih di kampung Ibu, Pak Maria itu Kalimantan Barat, itu banyak lagi yang didenda. Ini kita bicara ini, ini sana sini, ini uang di depan mata ataupun satu begini, Pak Ansi, karena kementerian ini mendapat PNBP 6 koma sekian triliun, kenapa pemerintah hanya mengasih 7 triliun, wajar kementerian *ndak* semangat. Ini semua ditarik Bu Sri Mulyani semua, coba kalau andaikan mereka bisa tarik 6 triliun, sama mereka 3 triliun, pasti saya kira Pak Roy pun gegap gempita untuk yang sudah disegel tadi pun, tambah segel lagi.

Saya kira itu saja, Bu. Fokusnya Pak Sekjen, berapa Bapak kasih Syukur, *Alhamdulillah*. Kalau *ndak* dikasih *enggak* apa-apa cuma jumpa Raker yang akan datang.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Pak Salim.

Silakan, Bu Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih.

Bu Menteri, Pak Sekjen, Pak Hartono, dan semua jajarannya, Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati.

Mungkin tadi sudah disampaikan, mohon maaf karena saya terlambat, tentang isu karbon, Bu Menteri. Jadi isu karbon ini kan saya termasuk orang yang menganggap bahwa ini adalah isu riil, bukan isu yang awang-awang, bukan isu yang langit gitu ya. Jadi, isu yang memang bisa kita turunkan ke bumi dan bisa diambil manfaatnya, *oh* nyatanya juga sudah ada, *trading* itu juga sudah ada. *Nah*, tentu kita sedang menunggu tentang skema yang ditetapkan oleh pemerintah karena Indonesia punya potensi yang sangat besar sekali untuk karbon ini, termasuk juga di dalamnya contohnya adalah bagaimana kita memberikan insentif terhadap rakyat gitu ya, apa relawan-relawan, jadi tidak dalam konteks yang besar. Misalnya dalam satu kawasan atau mungkin perusahaan besar atau komunitas yang besar, tapi komunitas-komunitas kecil yang banyak sekali berjejeran di seluruh Indonesia. Contoh yang saya tahu dan kita memang beberapa kali bertemu dengan relawan-relawan yang memang mereka menanam mangrove di Banten, kita pernah ketemu ya Mba, Bu Nur'aeni. Kemudian di tempat yang lain juga, kalau di Kediri itu mereka menanam ficus yang kemudian menjadi sentra ficus nasional jadi apa pusat ficus nasional. Mereka melakukan itu dengan sukarela dan maksud saya skema insentif untuk para relawan ini juga harus di... atau untuk para masyarakat yang memang memberikan kontribusi terhadap karbon ini juga harus ada di dalamnya dan kita tunggu, gitu. Jadi kita tunggu karena sampai hari ini juga masih belum ada skema yang bisa kita pake secara pasti.

Yang lain adalah kalau ficus, *oh* yang saya... kalau ficus di Kediri itu, Bu, ada hutan alam, hutan alam ya Pak ya namanya? Ya, ada hutan alam, ada konservasi yang tidak luas sebenarnya tetapi disitu sangat bagus karena monyetnya banyak sekali dan berdampingan dengan indah, dengan masyarakat di sekitarnya. Tidak ada acara si monyet ini kemudian mengambil makanan desa, itu tidak ada, karena mereka menanam makanan yang dimakan monyet di dalam hutan dan yang menanam ini adalah relawan yang tidak digaji oleh negara. *Nah*, ini yang kemudian menurut saya perlu diperhatikan sehingga selain tadi ya skema *carbon treat* yang besar lalu kemudian juga bagaimana memperhatikan relawan-relawan yang ini pasti tersebar di seluruh Indonesia.

Itu saja.

Terima kasih, Mas Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas tanggapan, masukan, catatan, pertanyaannya semua.

Berikut kita persilakan kepada Ibu Menteri LHK untuk memberikan jawaban atas tanggapan pertanyaan dari Anggota. Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Ibu-Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya sudah mencatat di dalam catatan saya ada 18 halaman, nanti kami akan buat yang tertulis tapi izinkan saya menyampaikan beberapa *highlight*.

Pertama, tentang realisasi anggaran. Yang tercatat disini angka 27 dan 29%, itu adalah angka SPDP, jadi yang sudah rapi, sudah *clear* dan sudah dalam *record* Menteri Keuangan, jadi sudah *audited* dan lain-lain. Tetapi, saya juga tadi sudah men-cek kepada Biro Ren dan Pak Sekjen, sebetulnya kalau persiapan SPJ-nya sudah bisa 35% dari SPJ ke SPDP itu kira-kira 1 minggu. Jadi, saya memang minta ini dipercepat dan terima kasih atas dorongan dan dukungan untuk percepatan ini, kami sangat menghargai.

Kalau dikaitkan dengan tadi ada usulan yang terhormat Anggota bahwa seharusnya PNBP dari penggunaan kawasan hutan yang denda-denda itu bisa. Itu ada yang sudah dihitung, sekarang angkanya di sembilan ratus koma satu miliar tapi baru terbayarkan 300 M, itu yang penggunaan kawasan, itu berbeda dari yang sawit. Yang sawit sekarang sudah ada satgas nasionalnya, diproyeksikan bisa 50 triliun lebih tapi dikelola oleh bukan dikelola di-*enforce*-nya gitu oleh Satgas nasional, ketuanya adalah Wamenkeu. KLHK tentu mendukung data dan sebagainya, jadi ini telah ditangani oleh satgas. Kemudian, karena pertanyaannya tentang karbon, saya mohon izin memaparkan sedikit saja 2, 3 *screen* tadi ditanyakan juga oleh yang terhormat Bapak Budi, memang sudah ada Peraturan Presiden Nomor 98 tentang Nilai Ekonomi Karbon, sebetulnya ini adalah terjemahan dari *carbon pricing*, perdagangan karbon tapi kita menyebutnya nilai ekonomi karbon. Ada beberapa mekanisme yang ditempuh yaitu perdagangan karbon, perdagangan emisi, jadi kemudian *offset* emisi, jadi apa Namanya dari yang ada kemudian dipakai karbonnya terus bisa dibayarkan. Kalau perdagangan emisi itu kinerjanya, kinerja pengurangannya. Ada yang pembayaran berbasis kinerja. Pembayaran berbasis kinerja itu, ini yang diberikan apakah oleh donor dan multilateral kepada Indonesia ini yang sudah dimulai dulu oleh Norway pada tahun 2010. Sekarang sudah menghasilkan, sudah mendapatkan hasil untuk Indonesia dari berbagai kebijakannya yaitu 56 juta dolar dan 102 juta dolar.

Nah, ini yang kemudian karena dia hasil kinerja insentif dari kinerja pemerintah, pemerintah daerah kemudian masyarakat, maka ini didistribusikan kepada provinsi-provinsi. Demikian. Kemudian, tentu ada pembayaran karbon, ada juga nanti mekanisme lain, jadi ada pajak karbon juga.

Nah apa yang penting dari mekanisme karbon ini? Pertama, *screen* berikutnya *deh*, pertama bahwa ada langkah atau proses orang untuk bisnis karbon termasuk juga tadi kelompok-kelompok kecil. Saya sangat sependapat, Ibu Pimpinan, bahwa itu harus kita akomodir, kita dorong, kita persiapkan. Jadi, langkah proses, kemudian ada standar atau instrumennya yaitu yang penting bahwa yang mau melakukan kegiatan atau akan bisnis karbon, itu harus melakukan pendaftaran pada sistem registri nasional. Sistem registri nasional itu, *apaan sih?* Itu pencatatan dan penelusuran negara terhadap entitas atau unit yang akan melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Yang penting kedua berikutnya adalah ketika akan bermain di karbon maka harus ada metoda perhitungan kriteria dalam menentukan jumlahnya terutama berkaitan dengan lahan. Jadi, namanya *measuring, reporting, and verification*. Jadi, ini mekanisme untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi kegiatan. Yang sekarang heboh adalah karena dari tahun 2010 sudah banyak yang mulai, Pak Ketua, tadi juga Pak Ketua mengkritisi ini, Ibu Pimpinan, dan sekarang pada waktu yang lalu ini belum diatur. Jadi, ada cara hitung sendiri yang kemudian dari berbagai penelitian internasional juga itu dinilai *fake carbon* jadi karbon dalam tanda kutip disebutnya karbon hantu, beneran apa *enggak* ini? *Nah*, ini yang kita control. Jadi pemerintah harus melakukan control. Jadi metodenya dicocokkan terus seperti apa yang pasti sesuai Pasal 33 UUD kan harusnya kebanyakan untuk masyarakat.

Kemudian kalau ini sudah, kemudian dia ditransform atau diberikan sertifikat pengurangan emisi karbon. Jadi, sertifikatnya diberikan dan ini yang diperjualbelikan sebetulnya sertifikat ini dan lalu ada otorisasinya. Jadi, karbon itu diberi sertifikat sebagai tanda bahwa ini di-*record* oleh pemerintah perjalanannya seperti apa dan seterusnya.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sertifikat yang mengeluarkan, siapa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pemerintah.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemerintah itu dalam hal ini...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

KLHK.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

KLHK.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Karena penanggung jawab.

Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang terhormat,

Dari KLHK sebetulnya yang kita jaga adalah bahwa yang terakhir deh, bahwa persoalan karbon ini mengaitnya kepada banyak undang-undang juga, Undang-Undang 41, Undang-Undang 32, Undang-Undang 18. Oleh karena itu, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua kalau *nggak* beres ya ditertibkan saja, begitu. *Nah*, ini yang sekarang kami sedang lakukan. Peraturan yang sudah keluar yaitu Perpres 98, kemudian sudah ada Permen 21 tentang Nilai Ekonomi Karbon, kemudian ada juga yang sekarang sudah siap di Kemenkumham, siap untuk diundangkan yaitu tentang karbon hutan. Kemudian, nanti tentang emisi dan sebagainya, jadi hal-hal seperti ini sekarang sedang dipersiapkan. Kira-kira itu tapi mungkin nanti untuk detail dan karena terkait dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan lain-lain yang harus ditertibkan, saya mungkin minta waktu untuk ekstra di luar Raker, misalkan kita bisa melakukan pendalaman tentang hal ini. Itu tentang karbon.

Yang kedua, saya mohon izin menyampaikan catatan kami tentang PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut bahwa PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang dimaksudkan untuk mendukung keterpeliharaan atau terpeliharanya daya dukung ekosistem dan pesisir laut. Tadi ditanya Bu Kiky sedimentasi *tuh* apa *sih* gitu? Kalau secara lingkungan kita melihat bahwa yang dimaksud sedimentasi itu adalah hasil dari proses koluviasi, masuknya material dari dataran yang lebih tinggi ke bawah serta aluviasi, jadi deposisi material dari yang searah karena gerakan, karena angin dan sebagainya. Itu namanya deposisi material yang disebut sedimentasi. Tapi di dalam pembahasannya, kita juga pada saat itu menangkap bahwa yang disebut hasil sedimentasi ini termasuk misalnya sampah limbah yang masuk ke dalam yang di dalam, termasuk juga mungkin yang tenggelam-tenggelam di waktu yang lalu, apa besi atau apa atau apa. *Nah*, itu yang kita tangkap sebagai hasil sedimentasi secara keseluruhan, begitu. Oleh karena itu, disitu dikatakan bahwa pengelolaan sedimentasi di laut dilakukan untuk menanggulangi daya dukung dan daya tampung ekosistem laut.

Kemudian, yang ada di PP itu dikatakan bahwa pengelolaan sedimentasi dikecualikan pada zona inti kawasan konservasi, kecuali untuk kepentingan kawasan konservasi dan di dalam PP itu disebutkan ada tim

kajian, tim kajian termasuk oleh KLHK memang disebut sih di dalam PP bahwa sedimentasi untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kemudian pembersihan hasil sedimentasi dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penjualan, dan sebagainya.

Kemudian, disitu juga disebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan hasil sedimentasi dijamin penerbitannya oleh Menteri ESDM atau gubernur dan untuk pemanfaatan untuk ekspor dari Menteri Perdagangan. Jadi, disini Pasal 33 PP 26 mengatur pengelolaan hasil dikecualikan untuk daerah lingkungan kerja atau kepentingan pelabuhan, wilayah izin usaha pertambangan, alur pelayaran, zona inti kawasan konservasi. *Nah*, apa yang bisa dilakukan KLHK dalam proses ini? Kalau kita lihat disitu ada proses perizinan berusaha. Jadi masih ada instrumen kontrol di dalam proses perizinan berusaha itu yaitu pada AMDAL, UKL-UPL dan sebagainya, itu yang pertama.

Yang kedua, disitu karena perizinannya bukan pasir seperti mineranya ESDM, maka harus ada KLBI baru, jadi ada apa namanya klasifikasi lingkup bisnis yang baru, begitu. Jadi, kalau sekarang *sih* kalau kelihatannya KBLI nya belum jadi juga mungkin belum *executable*, begitu. *Nah*, kemudian kalau dari KLHK masih ada ruang tadi selain dari tim kajian, perizinan usaha, kemudian kita akan kontrol dulu di batasan tentag KLBI nya juga dan yang terakhir tentu penegakan hukum. Jadi, dari sisi lingkungan kira-kira bisa menjaganya.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, yang saya tanyakan jadi nanti di dalam pengawasan apakah hanya PSDKP atau LHK ikut campur dalam pengawasan? Timnya ini loh.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau pengawasannya dari sisi perencanaannya di tim kajian, tapi kalau pengawasan lingkungan secara keseluruhan *sih* KKP punya, kita juga punya, nanti tinggal diatur, apakah...

KETUA RAPAT:

Kalau terjadi pelanggaran?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Bisa dua-duanya, bisa dia, bisa kita. Karena wilayah laut kan Ketua, di Undang-Undang Kelautan *tuh* ditangani oleh sana. Tapi lingkungan juga menangani karena *enggak* dibatasi...

KETUA RAPAT:

Nah, itu maksud saya misalnya dampak-dampak lingkungannya itu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau yang selama ini biasanya yang dilakukan kami termasuk kalau ada kena ke masyarakat apa segala itu yang turun KLHK langsung sampai diskusi dengan masyarakat itu, Pak Sigit, paling sering itu mendamaikan pencemaran itu namanya pencemaran, itu selama ini KLHK. Tapi, nanti untuk ini kita bisa lihat dengan KKP.

Karhutla tadi ditanyakan yang terhormat Bu Alien dan Pak Salim juga ya kalau *enggak* salah nanyain ya. Yang ditanyakan sangat mendasar dan sangat konseptual. Memang kita sejak, kan kita mulai masa sulit Karhutla itu 2015 kita kemudian tangani. Pada tahun 2015 *tuh*, 2 bulan *tuh transboundary haze* nya, jadi Singapura *tuh* kira-kira 2 bulan keasepan sama kita. Kemudian, di tahun 2016 berkurang menjadi 2 minggu, terus 2017 jadi 2 hari, 2018 hilang udah *enggak* ada lagi. Itu ada langkah-langkahnya terutama masih...masih... masih apa namanya... masih dengan apa namanya pemadaman dan lain-lain dan macam-macam nanti saya laporkan. Kemudian di tahun 2019, naik lagi, ini saya juga harus hati-hati karena 2023-2024 larinya ke Pemilu juga ya, semua orang sibuk. Ini kita musti hati-hati juga ya dan waspadai kemudian tahun 2020 kita sudah turunkan.

Pada Tahun 2019, itu dahsyat sampai 1,6 juta, di 2020 sudah tidak ada *transboundary haze*, di 2021 *enggak* ada, 2022 juga kemarin juga relative baik. Apa langkahnya? Pertama, *monitoring hot spot*. Tadi pertanyaannya Bu Alien yang terhormat, ngapain *sih* itu *hot spot* diliatin? Itu kita memang sejauh ini hanya bisa mengurangi dan memantau. *Hot spot* itu adalah titik panas yang ditangkap oleh computer. Jadi dari energi panas menjadi energi magnetik masuk ke komputer yaitu pada areal 1.000 hektar dengan tingkat panas tertentu yang diserap menjadi energi magnetik sehingga masuk ke komputer, itu konsepnya *hot spot*. Nah, jadi ada yang alamiah, ada yang tumbuh karena tangan manusia. Jadi, dan di *hot spot* itu biasanya kita hitung tingkat kepercayaan, yang paling kita jaga kalau dari *hot spot* itu kira-kira 80% kita percaya bahwa itu adalah *fire spot*, jadi *hot spot* itu belum tentu *fire spot*. Tapi kalau sudah sampai 80%, jadi di dalam komputernya itu keluar, jadi (*suara tidak jelas*) 0,8 artinya peluang bahwa dia 80% adalah *fire spot* itu yang kita jaga.

Nah, apalagi langkah berikutnya? Dalam hal ini adalah *monitoring hot spot* kemudian langsung pake sistem kabarin kalau ada *hot spot* yang serius dan kalau *hot spot* nya ini terus-terusan, kita juga musti *monitoring* dan ada awan masih bagus, awan hujan masih bagus, ada uap air maka kita lakukan modifikasi cuaca. Nah, sambil berjalan kalau ketahuan ada *hot spot* jadi *fire spot* maka dilakukan pemadaman darat. Jadi, tadi betul yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kiky bahwa *waterbombing* itu memang tidak sebegus pemadaman darat tapi di areal yang tidak bisa dijangkau, terpaksa pakai *waterbombing* terutama di tengah-tengah yang *enggak* bisa dijangkau.

Kemudian, kombinasi lainnya adalah mengajak mitra peduli api, masyarakat peduli api. Jadi, hebatnya Indonesia di dalam mengatasi Karhutla ini adalah karena partisipasi masyarakatnya. Jadi, masyarakat peduli apinya puluhan ribu juga *sih* jumlah kelompoknya, jadi kita bagus. Bayangin kalau

kayak Canada sudah sebulan kali ngirim asap ke Amerika dan sebelumnya di Arizona ada sendiri, di Australia juga beberapa tahun lalu juga ada kejadiannya berat. *Nah*, selain itu, paralegal jadi memberikan kesadaran hukum jadi pembinaan kelompok dan tata kelola Kawasan, tata kelola gambut terutama dari sisi teknologi, jadi tata airnya. Kemudian Karhutla, itu.

Kemudian polusi Jakarta. Saya memang mengikti perkembangan kritik terhadap polusi Jakarta. Pada dasarnya *sih* sebenarnya pencemaran udara di Jakarta kalau lihat datanya mengalami penurunan, sangat dipengaruhi oleh siklus tahunan dimana pada bulan Juni-Agustus selalu lebih tinggi memang daripada rata-rata tahunan. Kita melakukan *monitoring* KLHK itu, Dirjen PPKL itu punya instrument memonitor kayaknya lebih dari 100 sungai ya kemudian udara juga dimonitor terus, itu udah jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Tetapi memang ada kalau di polusi udara Jakarta ini dipengaruhi oleh arah angin, yang dominan saat ini merupakan angin timur yang kering.

KLHK dan DKI Jakarta saat ini sudah melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor dan akan menegakkan peraturan gubernur yang mewajibkan uji emisi untuk semua kendaraan termasuk yang dipikirkan adalah mungkin parkirnya dimahalin aja biar kendaraan pribadi *kagak* banyak-banyak dipakai, misalnya seperti itu antara lain sedang dipikirkan. Kemudian, ada *eco-driving*, jadi apa namanya cara menyetir mobil yang *enggak* banyak pakai bahan bakar dan sebagainya. Upaya ini dilakukan dengan antara lain dengan penggunaan kendaraan listrik, sudah ada perencanaan implementasinya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan perindustrian. Jadi, saya setuju apabila tadi diusulkan untuk dilakukan studi komprehensif pengendalian pencemaran udara yang ini akan kita masukkan di dalam rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. Ini sudah ada sebenarnya perintahnya di PP 22 Tahun 2021. Jadi, terima kasih atas catatan tentang polusi Jakarta.

Pak Ketua dan Pimpinan serta Ibu-Bapak yang kami hormati,

Ini saya dapat catatan dari Dirjen Gakkum tentang yang di Riau, Bapak, bahwa memang sudah dibentuk, sudah ada tim nya, sudah ke lapangan juga, kemudian dapur arang itu milik perorangan dan koperasi juga PT Fortindo Global Mandiri dan Anugerah Makmur Persada. Kemudian, diperoleh juga informasi bahwa kayu mangrove yang diolah dari koperasi pemegang izin HTR ini kami sedang minta Dirjen PHL untuk mengendalikan masalah ini. Kemudian, koperasi-koperasi yang terlibat itu seperti Koperasi Mangrove Lestari Lingga, Koperasi Wana Jaya Karimun, Koperasi Silva Aulia Lestari, Koperasi Mangrove Aulia Lestari, Koperasi Silva Sejahtera Berseri. Jadi, ini mohon izin, Ketua, Pak Dirjennya lagi di luar negeri, nanti kami pesankan untuk ini dilihat lagi dan dicek betul bagaimana mengendalikan perizinan HTR-nya ini.

Kemudian, di sisi lain....

KETUA RAPAT:

Jadi, pada waktu itu setelah disegel *kok* segelnya dicabut, tidak ada tindakan apapun dari Gakkum? kenapa diam aja?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin, oleh dijawab...

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Pak Sudin, terima kasih Bu Menteri.

Yang terhormat Pimpinan Pak Sudin,

Waktu itu kan kami tidak tahu segel dicabut dan kemudian sekarang kami sudah lakukan pemasangan kembali, Pak, pemasangan kembali segelnya, ya di PT IMP, sudah dipasang kembali, Bu, karena waktu itu kan kami tidak tahu lokasi dicabut segelnya.

KETUA RAPAT:

Ya, karena *enggak* ada pengawasan. Ini kan sampai Kajati turun tangan. Makanya Kajati juga saya dapat informasi yang valid, bahwa mohon maaf ada oknum yang bermain disana. Kalau *enggak*, mana mungkin mereka berani cabut. Ini kan suatu tindakan, ya kan? Kemudian, ada satu lagi ya kan seperti hutan buru itu akan dilakukan, akan diadakan proses penegakan hukum paling lama 3 bulan sejak dilaksanakan RDP. Waktu itu RDP dilakukan bulan Februari, sekarang sudah bulan Juni.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin Ketua, yang ini sudah dilakukan segel terhadap 12 lokasi.

KETUA RAPAT:

Itu yang arang, Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Bukan, itu yang taman buru, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, tapi sampai saat ini kan *enggak* ada tindakan apa-apa hanya disegel doang.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

PT Bumi Unggas Mandiri, PT Chareon Pokphan, Batam Balindo Jaya dan juga ada banyak perorangan juga, ada 7 atau 8 perorangan. Kami akan cek.

KETUA RAPAT:

Lebih Bu, ada 171 objek semuanya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, boleh saya tambah sedikit?

KETUA RAPAT:

Boleh.
Waktu itu Anda kesana kan?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya, saya kesana.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan ngomong.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ya.

Bu Menteri, Pak Dirjen,

Ini kan rekomendasi Komisi IV itu kan sudah lebih dari 3 bulan lalu, Pak Dirjen, dan yang kami inginkan itu adalah aspek penegakan hukumnya kan begitu. *Nah*, kalau seandainya rekomendasi ini tidak dilakukan, ini Pak Ketua, terus terang ini komisi dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif pada pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan rekomendasi ini atau mengabaikan, Pak. *Nah*, sebelum-sebelumnya, saya tidak pernah menyebut hal ini karena memang tenggat waktunya sudah lebih dari 3 bulan, Pak. Kami lihat belum ada tindakan hukum, maka saya perlu menegaskan dan mengingatkan ini Pak Roy. *Nah*, jangan sampai kita hanya merekomendasikan membuat kesimpulan ternyata itu kemudian sekadar jadi macam kertas saja, alias macan ompong di lapangan.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, saya juga bingung sudah hampir 4 bulan ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin, Pak Ketua, boleh dilaporkan?

KETUA RAPAT:

Boleh.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih, Pak Ketua, Pak Pimpinan.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Terima kasih, Pak Pimpinan, Pak Ansi Lema.

Sebenarnya sejak saya lakukan, kami lakukan proses-proses penegakan hukum, Pak, termasuk pemeriksaan kepada hampir lebih 30 ya baik orang, baik Pemda, dan sebagainya. Kemudian, juga kami melakukan pelacakan darimana sumber bahan baku arangnya. Kami temukan kan berasal ada 3 perusahaan koperasi yang memiliki izin di lokasi tersebut, ya. Kemudian kami juga berkaitan dengan perizinan, kami sudah menyurati kepada Dirjen PHL untuk mempelajari izin tersebut, karena bisa menjadi sumber untuk melakukan pencucian kayu disana. Kami juga dalam konteks pemeriksaan, kami sudah memanggil banyak pihak, tadi sudah disampaikan Pak Sudin, Pak Pimpinan, waktu itu memang kami tidak tahu dilaporkan Pak Pimpinan waktu FGD ada proses pembukaan segel kita. Kemudian kami datang ke lokasi, kemudian kami segel kembali dan kami panggil direktornya. Saat ini kami sedang konsultasi dengan pihak kejaksaan untuk penentuan, proses penentuan tersangkanya karena ini penting dilakukan, kami lakukan harus kehati-hatian karena beberapa kasus Pak Pimpinan, Pak Sudiin bahwa kami juga menghadapi gugatan pra peradilan dan sebagainya. Kami harus lakukan sangat hati-hati, Pak, dalam penentuan tersangka ini. Sebagai contoh tadi di pembukaan Pak Sudin menyampaikan ada kasus di Belitung Timur, Pak Sudin. Hari ini kami di pra peradilan di Belitung Timur, Pak. Tim kami disana, kami digugat, kami sudah tetapkan tersangka, kami sudah tahan pelakunya, kemudian kami digugat di pra-peradilan di Belitung Timur. Jadi, banyak kasus-kasus lain yang kami hadapi seperti itu, jadi kami harus hati-hati dalam menghadapi ini Pak Ansi Lema. Proses ini berjalan Pak, kami sudah tugaskan tim untuk menambahkan lagi jumlah penyidik untuk memastikan bahwa tidak ada lagi celah perlawanan-perlawanan hukum di lapangan terhadap para penyidik kami. Jadi, kami tidak berhenti, Pak. Iya, ini kami sampaikan. Kalau foto-foto kami lampirkan siapa yang dipanggil dan sebagainya, itu Pak Sudin terkait dengan arang apa namanya arang rempang di Pulau, di Kepri... di Kepri, Pak Sudin.

Kemudian yang kedua Bu Menteri, mohon izin, Pak Sudin, berkaitan dengan napa namanya taman buru, kegiatan taman buru dan kami sudah lakukan penyegelan dan sebagainya. Memang ini ada satu tantangan, Pak Sudin, berkaitan dengan statusnya dimana perlu kami sampaikan mengingat

adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 24 bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum PP 24 yang kami segel tersebut, ini ada mekanisme pengenaan sanksi administrasi atau pendendaan administratif, kemudian kita lihat bagaimana status kawasan itu kalau itu kawasan konservasi atau pun kawasan lindung harus dikembalikan ke negara. Kalau hutan produksi itu bisa dilanjutkan setelah membayar denda.

KETUA RAPAT:

Kalau hutan buru itu hutan apa?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Konservasi, Pak.

KETUA RAPAT:

Terus diapain?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Ini tapi tetap prosedurnya Pak, pertama prosedur itu harus melalui denda administrative, sanksi administrative. Kami sudah menyampaikan ini kepada (*suara tidak jelas*) Wasdal, Pak Sekjen, disampaikan daftar nama-nama. Kami minta arahan di dalam langkah-langkah hukum apa yang harus kami lakukan. Sekali lagi, kenapa kami harus selalu hati-hati seperti ini karena saat ini semakin hari semakin banyak kami menerima gugatan pra peradilan, banyak sekali kami menerima gugatan pra peradilan yang harus kami antisipasi. Untuk itu kami harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Itu Pak Pimpinan, Pak Sudin.

Jadi, kalau yang Pulau Buru itu, kalau mereka... kepala buru... taman buru itu berdasarkan status Kawasan, kalau mereka memang sudah membayar denda, mohon koreksi Pak Sekjen, PP 24 ya, kalau mereka sudah membayar denda, hutan lindung maupun hutan konservasi setelah mereka membayar denda itu dikembalikan kepada negara kawasan itu.

KETUA RAPAT:

Itu bicara UU CK, tapi Anda tidak menarik lagi UU, Undang-Undang KSDAE, coba baca yang betul. Di Undang-Undang KSDAE sudah jelas ya kan? Siapa yang merusak kawasan konservasi dikenakan hukuman. Nanti dibaca lagi, jangan pakai kaca mata kuda hanya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya katakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat hukum. Itu saja, walaupun itu dibahas oleh antara pemerintah dan DPR. Karena banyak sekali *kok* pelanggaran-pelanggaran yang seolah-olah dihilangkan begitu saja, dikenakan denda. Kalau denda apakah hutannya akan kembali? kan tidak, hutannya tetap rusak loh. Disini sudah jelas waktu itu Komisi IV mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memulai penindakan hukum atas semua aktivitas yang sudah terbangun dalam kawasan hutan

produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi di Kota Batam selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Dirjen Penegakan Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum selambat-lambatnya 2 minggu setelah rapat dengar pendapat ini. Ini kesepakatan kita bersama loh.

Tadi pasal yang dikatakan Pak Ansi bisa saja kami lakukan, ya kan? Saya itu sungguh jengkel sekali, saya capek, hujan ya kan, kita segel tiba-tiba segelnya dibuka begitu saja. Coba kalau Sekjen jadi DPR, tersinggung *enggak gitu? Nah*, waktu itu Dirjen PSL mengatakan tidak ada izin yang dikeluarkan, waktu itu RDP, dia ngomong *enggak* ada yang dikeluarkan. Maka saya juga bingung ini, rekamannya masih ada, saya tidak ingin menyalahkan siapapun tapi alangkah naifnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, untuk apa? untuk kelestarian. Sementara satu sisi masih ada izin yang dikeluarkan di tempat yang lain. Kira-kira ini, kita ngomongin ilustrasi. Kalau dengan diameter 10 atau 15, mangrove itu berapa lama, Pak? Bapak ngerti kan? berapa lama untuk mencapai 5, diameter 10 *deh*. Bapak jawab, tolong. *Nah*, 10 tahun. Apa mungkin... apa mungkin satu bulan mereka ekspor 2 perusahaan itu hampir seribu ton? Kalau 1.000 ton itu kira-kira membutuhkan berapa banyak pohon mangrovenya? paling tidak hitungan saya kalau dihitung rendemennya 1 banding 3, itu pun masih mungkin, karena setelah dibakar arangnya itu kan akan ringan. Mungkin juga bisa 1 banding 4. Jadi, 4 kilo kayu mangrove itu mendapatkan 1 kilo arang kayu mangrove. Ya, kalaunya segel-segel *enggak* ada tindakan hukum, ya percuma. Kalau ya begini ya seperti kata Pak Ansi, nanti Pak Ansi akan melaporkan kepada Presiden. Ya, kalau perlu nanti saya juga laporkan ke penegak hukum ke Mabes POLRI sekalian. *Kok* kenapa *nggak* ada tindakan? Ya, mereka kan masih tetap berjalan *kok*. Yang saya sayangkan itu, petugas yang katanya cuma 4 orang disana tidak mengetahui atau mengetahui, tutup mata, kan hanya itu saja ya kan.

Jadi, buat apa ada kesimpulan rapat, ada kesepakatan akan tindak 2 minggu dari Februari. Coba nanti dimasukkan lagi kesimpulannya, ditambahin nanti untuk yang hari ini. Ini untuk koreksi kita semua karena saya tidak mau alam ini rusak karena keuntungan segelintir pengusaha yang tadi, yang tidak punya jiwa nasionalis, yang penting saya dapat duit, untung, tidak memikirkan masa depan yang akan datang. Kemarin saya ada rapat kerja, Rakernas saya di partai. Saya ngomong dengan Kalimantan Utara, itu berapa luas tambak yang ditinggalkan setelah dibongkar mangrovenya kemudian tambaknya tidak berhasil, itu tambaknya ditinggalkan puluhan ribu hektar ya kan? Coba berapa *enggak* rusaknya alam kita dengan itu. Belum tadi yang Mba Alien katakan di Pulau Obi. Ya, nanti saya kira kita tindak kalau memang *tailingnya* merusak alam, lingkungan, segel aja. Saya *enggak* mau tahu siapa bekingnya, sikat-sikat aja karena kalau begitu dibiarkan yang lain juga akan bilang dia boleh *kok* saya *enggak* boleh, paham kan Bu Menteri maksud saya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ya, Ketua, mohon izin. Kalau saya lihat posisinya disini HTR nya izin dari tahun 2010 sampai dengan Juni 2014. Saya sudah bilang sama Pak Sekjen kalau gitu segera dibekukan izinnya dan untuk dicabut.

KETUA RAPAT:

Berarti dia sudah melanggar 9 tahun. Dari tahun 2010 sampai 2014.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Dari tahun 2010 sampai 2014. Ya, izin ada yang keluar 2010, ini kan di catatan saya, Ketua, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 yang badan hukum, itu izinnya ada yang tahun 2010, 2012, terus Juni 2014.

KETUA RAPAT:

Ya, berarti mereka kan ada pelanggaran hukum selama 9 tahun lah ya kurang lebih, ada yang 9, ada yang 10 tahun *toh*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ini *enggak* masuk UU CK.

KETUA RAPAT:

Iya kan? Ini kan tidak masuk UU CK, kan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kami dalami, Ketua...

KETUA RAPAT:

Segera, saya tidak mau tahu segera ditindakan hukum aja, kalau perlu bongkar aja, ya.

Satu lagi Bu Menteri *nih*, antara dokumen yang dikeluarkan oleh LHK mengenai lahan gambut yang dipulihkan ya, *high claim* pembangunan LHK 2024 untuk mendukung prioritas nasional. Di sini lahan gambut yang dipulihkan 300.000 hektar tapi bahan dari BRGM 355.000 hektar. Saya bingung ini, mana ini yang benar. Coba supaya jangan nanti BRGM bilang begini, seperti kemarin ya, seperti kemarin BRGM mengundang FGD, ya Pak Sekjen, betul kan? tapi Sekjenya *enggak* datang, Ibu Menteriya *enggak* datang. Ya, Sekjen, gitu kan, *enggak* datang juga kan, karena nggak dikasih tau kan?

SEKRETARIS JENDERAL KLHK:

Tidak diundang, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, tidak diundang, pantas saja kalau gara-gara *enggak* diundang ini bahannya pun sampe beda ini, 300 sama 355. Coba jelaskan yang 355 darimana? Jadi kalau tadi Ibu Menteri tadi mengatakan 300.000 di bahannya tapi di bahannya BGRM 355.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE KLHK:

Izin menambahkan, Bapak Ketua.

Jadi di bahan kami memang kami laporkan capaian restorasi gambut sampai posisi tahun 2023. Tugas yang diberikan Presiden kepada BRGM untuk restorasi gambut mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 ini 1,2 juta hektar, Bapak. Kemudian pada tahun 2021 di bahan kami di halaman 13, tahun 2021 kami berhasil merealisasikan 300.345 hektar. Kemudian, tahun 2022 tahun kemarin karena ada pengurangan dari target 310, kami merealisasikan 244,168 hektar. Kemudian, tahun 2023 ini kami mentargetkan 336.270, Pak. Ini yang *on the way* sekarang untuk tahun berjalan.

KETUA RAPAT:

Kira-kira tercapai *enggak*?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE KLHK:

Insyallah tercapai, Pak.

KETUA RAPAT:

Yang 2024?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE KLHK:

2024 dengan anggaran yang agak turun sedikit, mungkin targetnya agak turun dari angka yang kami prediksi sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Pak, ini bicara anggaran bicara program, *kok* Bapak bicara mungkin. Jadi nanti setiap apa kita harus bicara mungkin gitu? *Enggak*, saya minta *fix* nya aja, kan Anda mengatakan disini 355, tapi bahan dari Bu Menteri 300, iya kan? supaya kita seragam *loh*. Jangan nanti Anda bilang, mungkin targetnya 355 tapi tercapainya 255. Ini kan *enggak fair* lah bicara mungkin, ini mengelola negara loh, mengelola negara ini dan yang dikelola ini bukan masalah uangnya, tetapi Anda ini bebannya berat sekali mengelola sumber daya orang yang sedemikian banyaknya melibatkan sekian puluh ribu masyarakat. Jadi targetnya 355 apa 300.000?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE KLHK:

Baik.

Untuk melengkapi target sebetulnya seribu... untuk melengkapi target yang 1,2 juta, Bapak Pimpinan, angka yang harus direalisasikan untuk tahun 2024 adalah 355.000 karena menutup defisit yang lalu.

KETUA RAPAT:

Tapi uangnya cukup *enggak*?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE KLHK:

Nah, uangnya yang...

KETUA RAPAT:

Nah, itu loh. Kalau bicara menutup defisit itu dihitung dulu anggarannya. Anggarannya cukup *enggak*? menjadi 355, kalau *enggak* cukup ya tetep 300.000, berarti tidak tercapai, tidak tercapai, Anda tidak disalahkan, Pak, karena apa? memang uangnya *kagak* cukup, kan begitu? Kalau uangnya cukup, kalau bisa ya 400.000 saya lebih setuju, tapi dengan ketentuan harus dengan pengawasan yang baik tepat sasaran, jadi uangnya jangan sampai tidak jelas ini. Karena kalau saya lihat ya secara kasat mata, saya lihat beberapa kali di tempat itu, kalau Anda hanya menanam satu titik satu batang, *wassalam*. Tidak mungkin, maka saya bilang beberapa kali ke Anda, Anda datang ke Lampung Selatan, Anda lihat *tuh*. Mereka bikin petakan, satu petakan misalnya 100m², itu lah dikasih bambu, mangrove ditanam disitu. Jadi disitu baru kelihatan bahwa petak ini adalah petak kelompoknya si A, matinya berapa, hidupnya berapa. Saya yakin kalau dipetakan seperti ini dikasih bambu, itu kan menghambat laju kencangnya si ombak *nih*, makanya saya bilang coba ke Lampung Selatan. Pak Idi itu mempunyai konsep seperti itu, jadi per blok, jadi kalau misalnya satu blok itu rusak, oh berarti ini *enggak* benar kerjanya. Tetapi, yang saya lihat karena ada bump-nya, untuk menghalangi si ombak, si arus merusak itu kecil sekali, ya kalau di pelabuhan dibidang ada *break waternya* lah. Ya, nanti saya minta direvisi nih kalau memang uangnya *enggak* cukup.

Lanjutkan Bu Menteri kalau masih ada.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Masih sedikit yang terhormat, Ketua.

Jadi terkait dengan kapal yang di Nias, Tim Gakkum KLHK sudah turun dan menyiapkan langkah penyelesaian ganti rugi dan pemulihan. Tim ahli juga untuk KLHK telah menghitung kerugiannya yaitu sebesar 123 miliar dan saat ini sedang dipersiapkan pembahasan dengan pihak kapal untuk proses ganti rugi tersebut. Untuk kerugian masyarakat, Kementerian LHK Tim

Gakkum juga sudah bertemu membahas dengan pemerintah daerah Kabupaten di Nias. Jadi, langkah pertama yang dilakukan ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, apabila tidak disepakati penyelesaian maka kita akan mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Pimpinan, saya mau...

KETUA RAPAT:

Mumpung lagi masalah limbah tadi yang tumpah, kalau pengusahanya berjanji akan mengganti rugi, jaminannya apa, Bu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ada aturannya ya Pak Roy? Ada regulasinya, Ketua.

KETUA RAPAT:

Coba saya mau tahu regulasinya, jangan seperti kasus di Lampung. Yang di Lampung itu yang tumpahan limbah itu sampai sekarang juga *enggak* ada beritanya lagi, *enggak* pernah saya diinfokan lagi, sementara rakyat saya di sana kan selalu bicara lingkungan hidup kok diam saja? Coba, saya mau tahu.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Terima kasih, Pak Sudin, Pak Pimpinan.

Jadi kami memang diberi otoritas untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, Pak. Untuk beberapa kasus yang terjadi baik di laut maupun di darat juga, jadi ada undang-undangnya, Pak. Adapun kalau seandainya dasar hukumnya ini undang-undang, Pak, Pasal 8, silakan saya akan sampaikan ke Bapak karena Menteri memang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa luar pengadilan maupun menggugat melalui pengadilan. Biasanya prosesnya sebelum gugatan pengadilan, kita lakukan luar pengadilan dulu, Pak. Ada kesepakatan mereka tanda tangan, mereka bayar ke negara, ini PNBP kita juga ada berkaitan dengan itu, selama ini terjadi, Pak.

Kemudian, kalau mereka tidak melakukan pembayaran, kita melakukan gugatan melalui pengadilan, Pak. Kami juga banyak juga kasus-kasus kami gugat di pengadilan juga berkaitan dengan kerusakan pencemaran lingkungan ini, Pak Sudin. Untuk yang Lampung, Pak Sudin, kasus itu adalah tumpahan minyak apa namanya oleh OSES Pertamina. *Nah*, itu kan waktu itu Pertamina dan masyarakat akan menyelesaikan langsung ke Masyarakat, Pak, sedangkan kami kan memberikan sanksi kepada mereka. Kami memang tidak menyiapkan untuk melakukan gugatan luar pengadilan untuk kerugian lingkungannya, karena ini kami memberikan sanksi administrative. Untuk Masyarakat, Pak, memang kalau belum terjadi nanti kami akan mencoba, Pak, fasilitasi misalnya masyarakat yang rugi akan kami panggilkan Pertamina,

kami sebagai mediasi di antara pemerintah dan Masyarakat, Pak Sudin, kalau untuk kasus yang di Lampung. Itu, Pak Sudin.

KETUA RAPAT:

Kalau kasus yang aspal ini apa jaminannya? Apalagi kapalnya kapal asing kan?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Iya, kapal asing.

KETUA RAPAT:

Dia bilang akan berkata mengganti rugi kerugian masyarakat terdampak sekian rupiah, ya *toh?* sekarang kapalnya dimana?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Iya. Kapalnya kan rusak, Bu di dalam kapal tap ikan...

KETUA RAPAT:

Sekarang, kapalnya dimana?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Di Nias, Pak, rusak di dalam.

KETUA RAPAT:

Berarti harus diminta laporkan...

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Tenggelam.

KETUA RAPAT:

Ke penegak hukum maupun ke pelabuhan, kepanduan agar kapal tersebut jangan jalan dulu kalau sebelum ganti ruginya selesai ini. Jangan sampai seperti kasus Pertamina lagi di Lampung ini.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Kalau ininya, Pak, jaminannya kan mereka punya perwakilan di sini, Pak, ada pihak asuransi, Pak Sudin. Biasanya kami melakukan apa namanya, (*suara tidak jelas*) kalau pengadilan itu dengan pihak perusahaan, perwakilan perusahaan dan juga pihak asuransi, Pak Sudin.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau pihak perwakilan nanti bilang dia *enggak* mampu? Kapal nya sudah jalan?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Enggak, kalau ini kapal nya *enggak* bisa jalan, Pak, kapal sudah tenggelam di lokasi itu, Pak. Tapi pengalaman kami beberapa kapal juga kami ada kapal dengan kapal Inggris, kapal Belgia, Pak, mereka juga melakukan ganti rugi kepada pemerintah, Pak, dan kami berhasil juga meminta ganti rugi kepada mereka ya ada yang 2 juta dolar, 1 juta dolar, dan sebagainya.

Terima kasih, Bu Menteri.

KETUA RAPAT:

Saya *tuh* yang saya pikirkan dampaknya terhadap masyarakat, ya seperti pengerukan Pelabuhan Panjang. Itu kan kasusnya hilang sekian tahun, iya kan? pendalaman alur limbahnya diambil di Pelabuhan Panjang, limbahnya dibuang ke dekat situ, akibatnya apa? Pemilik keramba jaring apung mati sekian puluh miliar kerugiannya. Sudah ada negosiasi antara Pelindo dengan pemilik tapi sampai sekarang *enggak* ada ganti ruginya.

Itu aja Bu Menteri dilanjutkan kalau ada.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Izin Ketua, sedikit menyangkut dengan limbah tadi saya ingin sampaikan yang dari Aceh sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Langsung saja Bu Menteri, tadi kan kita dengar penjelasan apa yang ditanyakan menyangkut dengan yang di Batam, yang di Batam ya oh yang di Nias ya. Di Aceh, Pak Ketua, itu pernah ada tenggelamnya batu bara yang (*suara tidak jelas*) asuransi telah dibayar semuanya, dan sebagian telah dikerjakan. Uang dari asuransi untuk menyelesaikan perkara limbah disitu kan sudah masuk ke dalam negara, sudah masuk ke kas negara sekarang, malah sampai sekarang masyarakat terus menuntut ada sisa pekerjaan yang belum dikerjakan tapi uang itu kan katanya di keuangan, jadi begitu rumit ini. Jadi, uang dari asuransi sudah di-*claim*, dari asuransi telah dibayar tapi di lapangan belum selesai. Ini mohon perhatian, kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Roy, Pak Roy tolong segera selesaikan itu karena itu uang asuransi telah dibayar dan telah masuk ke republik kita, uang dari asing. *Kok* uang dari

pemerintah kita sendiri belum selesai. Jadi saya pikir masyarakat Lhoknga, Aceh Besar menunggu penyelesaian itu, Pak Roy.

Terima kasih.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK:

Mohon izin, Pak Sudin, Pimpinan ya.

Terima kasih, Pak Khalid.

Ya, untuk kasus itu sekarang kan kami sudah minta kepada Kementerian Keuangan agar kami bisa menggunakan PNPB untuk kasus-kasus seperti itu dan sudah disetujui, baru disetujui, Pak. Kami sedang menyiapkan itu, Pak. Jadi karena dorongan Pak Khalid dan sebagainya juga, kami akhirnya meminta kepada Keuangan, ini bagaimana ini? Kami sudah mendapatkan ganti rugi tapi *kok* kita *enggak* bisa membantu masyarakatnya yang memulihkan itu, di luar yang masyarakat langsung ya. Ini kan kami wakilin negara lah, pemerintah. Jadi begitu, Bu Menteri. Jadi memang prosesnya kita jalanin terus, Pak, memang ada, terus berkembang. Kami nanti akan minta ke Keuangan ya, kami sudah boleh menggunakan itu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin Ketua, sudah ada persetujuan dari Menteri Keuangan untuk penggunaan tambahan PNPB Gakkum sebesar 197 miliar tapi baru persetujuan, nanti kami laporkan secara detail, Ketua. Ini mungkin nanti bagian ini, termasuk Pak Roy yang harus kita selesaikan yang Aceh.

Terima kasih, Ketua.

Saya, oh tadi Pak Salim juga *enggak* ada. Saya berterima kasih tadi tentang deforestasi diangkat oleh yang terhormat Pak Ansi Lema termasuk metodologinya. Deforestasi ini menjadi instrumen politik internasional yang cukup dahsyat termasuk cukup merugikan Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang EUDR deforestasi oleh Uni Eropa. Kita memang punya planologi itu punya namanya sistem *monitoring* kehutanan nasional Simontana, yang merekam dengan baik deforestasi kita, termasuk disitu pembagian klasifikasi yang disebut hutan primer apa, hutan sekunder, dan sebagainya yang ternyata pada saat ini kita sedang beradu secara internasional dengan metodologi *Global Forest Watch/GFW* yang saya minta tim internasionalnya turun cek ke lapangan beradu metodologi karena angkanya sangat berbeda. Kita dirugikan dengan metodologi internasional, Ketua karena ternyata HTI-HTI dia bilang hutan primer. Jadi katanya Indonesia jagoan deforestasi padahal fakta di lapangannya tidak seperti itu sehingga kami meminta tim turun ke lapangan, sekarang sedang di lapangan sedang beradu metodologi. Mudah-mudahan, kita bisa mengatasi ini dengan baik secara internasional. Jadi, metodenya ada nanti saya akan minta dilaporkan secara khusus tentang *report* tentang deforestasi. Ini Pak Salim masuk, Ketua, saya kayaknya mesti jawab.

Pertama, tentang gedung kantor. Yang diminta gedung kantor itu untuk balai konservasi balai besar PNGL 35 miliar tapi memang kalau mintanya ke APBN kalau untuk gedung kantor, renovasi, dan sebagainya sangat sulit. Tapi saya akan *appeal* ke Menteri Keuangan secara khusus untuk ini sambil saya tadi sudah minta Pak Sekjen carikan peluang dananya yang paling memungkinkan, itu yang pertama, Bapak. Jadi, mohon maaf kalau udah kelamaan ini *enggak* diberes-beresin.

Yang kedua, tentang kasus SPS kasus Karhutla. Kita sudah menyurati Menteri Keuangan, kita sudah menyurati Menteri Keuangan ternyata tidak diizinkan untuk mengurangi cicilan eh untuk mengurangi ganti rugi dan juga melakukan cicilan. Jadi *enggak* menurut Keuangan keringanan atau pencicilan untuk PNPB hanya yang di luar pengadilan. Jadi gambarannya seperti itu, Pak Salim. Jadi, nanti kita sambal lihat yang memungkinkan.

Terima kasih, Pak Ketua, nanti semuanya akan kami rangkum secara tertulis. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, sedikit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sedikit, Pak Ketua.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Coba yang adil, siapa duluan?

KETUA RAPAT:

Ya, udah lah Bang Salim deh karena orang yang lebih tua, kita musti ngalah.

Silakan, Bang Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Bu Menteri, sebenarnya ini kan masalah kemauan Pak Ketua, kalau sudah Ibu Menteri setuju uang dari mana pun bisa asal dalam aturan. *Enggak* susah kali itu, Bu, cuma kalau dikasih dan yang dibangun Ibu bukan untuk pribadi saya, Bu Menteri. Kalau untuk pribadi saya, Pak Sekjen sudah lihat itu kantor dari tahun '82. Memang saya akrab dengan Pak Sekjen, cuma lebih akrab, Pak Sudin lagi. Itu Bu, karena tahun ini kan PON Indonesia kan *venue*nya salah satu disitu, Bu. Artinya, saya bukan apa tadi, saya agak kesal aja tadi Pak Sekjen karena laporan kepala balai hanya 1 miliar, Bu, 1 miliar tidak memungkinkan. Setelah di-WA, Pak Sekjen, barusan Bu, walaupun WA,

bayangan, asal setuju Ibu Menteri dan Pak Sekjen akan mengambil kebijakan Bu. *Nih*, saya sudah dengar tadi Bu Menteri setuju, sudah diperintah, sudah diamankan oleh Pak Wamen, Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ansi, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, singkat saja terkait dengan pemadaman api di hutan dan sebagainya, Bu Menteri kalau boleh soal Sarpras itu untuk lebih diperhatikan.

Yang kedua, juga ada aspirasi dari teman-teman manggala agni itu, Bu. Mereka kan rata-rata statusnya honorer *tuh*, apakah mungkin ditingkatkan menjadi P3K itu.

Yang kedua Bu Menteri, ya kita tahu bahwa Ibu Menteri ini satu-satunya guru besar karbon di republik ini, kan begitu. Terus terang Bu, kami mungkin di kesempatan selanjutnya *tuh* pengen tahu Bu terutama terkait dengan perhitungan nilai emisi karbon ini, terus tata cara perdagangan karbon baik yang domestik maupun internasional, Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup ya Bu ya, saya sudah hampir selesai, cuma Ibu *nih* ada hutang saya satu, Bu, sampai sekarang belum selesai *nih*, Bu. Pak Sekjen, janji saya, Bu, bulan Juni mau ke Lampung mau membawa suratnya Sukapura tapi sampai saat ini belum ada juga. Sudah selesai? sudah tanda tangan? Udah? Ya, kapan kita eksekusi? bulan Juli? Kalau sama saya nego gampang, tapi kalau sama yang satu lagi yang hari ini *enggak* datang, yang janji katanya mau lihat gajah ya kan? Nanti dia ngoceh-ngoceh lagi, orang tua tau sendiri kan?

Terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah menyampaikan jawabannya dari dialog diskusi, saran, dan masukan. Sebelum acara ini kita akhiri, kami akan membacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini.

Silakan, Bu Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih, Ketua.

Sebelum saya bacakan tentang deforestasi tadi, Bu Menteri. Ini saya tadi sudah disampaikan Bu Menteri, Pak Ansi Lema juga sudah memberikan ulasanya dan ini memang sangat penting sekali, sangat-sangat penting. Jadi untuk mohon diformulasikan komunikasinya supaya tidak kalau Bahasa Jawa itu *ombro-ombro*, kemana-kemana isunya, apa namanya, ini tentang kedaulatan kita juga ya, kedaulatan Bangsa Indonesia juga jadi perlu diformulasikan secara apik begitu, oh ada Pak Apik ya, secara baik maksudnya supaya enak baik untuk kita di Indonesia juga di dunia internasional. Karena yang bertanya tidak hanya teman-teman di internasional yang menyerang tetapi teman-teman yang ada di dalam Indonesia, di negeri sendiri juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu.

Baik, Bapak-Ibu, saya akan...

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, kira-kira kalau dengan nilai pagu 7,5 triliun ini cukup *enggak sih* untuk LHK?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ketua izin, kalau usulnya tempo hari *sih* 11 T, Ketua.

KETUA RAPAT:

Usulnya 11 T, ya, kalau gitu dimasukin tambahan lagi di kesimpulan rapatnya minta penambahan 2,5 T lagi. Masukin saja, Ini usulan resmi dari Komisi IV, nanti saya bicara juga dengan Ketua Banggar. Ya, kalau minta 2,5 dapat 1,5 T kan lumayan Bu untuk tambahan operasional. Tadi dikatakan misalnya manggala agni, kemudian untuk KSDAE dan lain-lain termasuk juga untuk limbah sampah yang beracun itu, ya kan misalkan, masukkan saja, dimasukkan tambahan usulan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ketua, izin Ketua.

Kan PNPB Gakkum denda kan 50 T mungkin bisa tambahan.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau 50 T mungkin minta cuma 2,5 kan wajar *toh?* Ya, dimasukkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ya, kalau *enggak* diminta *enggak* dikasih. Jadi diminta dulu baru dikasih.

KETUA RAPAT:

Ya, karena kalau Ibu diam kan dianggapnya sudah cukup. Jadi nanti kalau Dirjen Gakkum ini kemana-mana sampai tempat dibayarin makan dibayarin hotel, disiapkan mobil, ya mungkin karena anggarannya *enggak* cukup. Contoh-contoh ya di KKP tadi, Indonesia itu tetap 365 hari setahun tapi untuk patroli layarnya itu mereka cuma 80 hari, Bu, selebihnya *wassalam*. Karena apa? karena duitnya nggak ada solarnya juga solar mahal, tidak boleh solar subsidi. Ya kan? Ya, saya tidak mau seperti itu ya. Dimasukkan saja Komisi IV meminta gitu tambahan anggaran 2,5 triliun.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit, Ketua.

Mendukung boleh? *Enggak* ini kan mendukung. Ini lah sebagai contoh sebagai contoh kekompakan Pak Ketua sama Sekjen, *enggak* diminta pun, Ketua tambah, ya sama Sekjen kompak *tuh*.

KETUA RAPAT:

Sudah, tugas Anda itu nanti di Banggar tuh ngotot, udah gitu-gitu aja.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Mudah-mudahan.

KETUA RAPAT:

Jangan bilang mudah-mudahan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ya, Ketua tengok buktinya.

KETUA RAPAT:

Iya, jangan bilang mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu kayak Pak itu tuh tadi mungkin.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Oh, kalau kita agak masa Islam, Ketua, Insya Allah.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Beda sama, Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti saya cek melalui Pak Sahid nanti, betul *enggak* ngomong.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Udah ya?

Baik.

Bapak-Ibu, akan kami bacakan rancangan kesimpulan rapat kita kali ini. Poin pertama... pesannya Ketua jangan banyak yang protes karena mau Shalat Maghrib katanya.

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebesar Rp7.539.915.254.000,00 (tujuh triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

Bu Menteri?

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju, Ketua.
Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI dalam pagu indikatif tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Para Anggota? Para Anggota?

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA:

Setuju

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu Menteri?

MENTERI LHK RI:

Terima kasih banyak, Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota, terima kasih.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif Belanja Tahun Anggaran 2024, dalam rangka memenuhi target-target program yang belum tercapai sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diantaranya target rehabilitasi mangrove, target rehabilitasi lahan kritis, target peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta target redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hutan.

Para Anggota?
Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Boleh ditambahin enggak, Pimpinan?

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Target perhutanan sosial dan redistribusi tanah, jadi yang terakhir bagian yang terakhir. Serta target perhutanan sosial dan redistribusi tanah, objek reformasi agraria.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Para Anggota?
Bu Menteri?

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai progres penyusunan peraturan perundang turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, terutama mengenai tata cara perdagangan karbon untuk mendukung beroperasinya Bursa Karbon pada bulan September 2023.

Para Anggota?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju, kami siapkan.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun kajian ilmiah yang komprehensif guna mendapatkan alternatif solusi dalam pencegahan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari usaha dan/atau kegiatan berisiko, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Para Anggota?
Bu Menteri, poin 5?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin itu keluar sebelum ada istilah perizinan berusaha. Kalau boleh membekukan perizinan HTR begitu saja, perizinannya dibuang. P nya huruf kecil. Eh kecepetan.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masih nomor 5, Bu, tentang Jakarta. Ini kajian ilmiah

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ya, kalau bacaannya kajian ilmiah mesti ke BRIN ya. Kalau dia kajian aja bisa KLHK kayaknya.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berarti ilmiahnya diganti, diubah atau bagaimana? Kajian yang komprehensif, karena kajiannya ini kan langsung di lapangan gitu loh, *enggak* hanya kajian di dalam ruangan. Memang berarti ilmiahnya diubah ya? Dicoret ya? Gitu, Ketua?

Baik, Bapak-Ibu, setuju?

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. ENDANG SETYAWATI THOHARI, D.E.S.S., M.Sc.):

Ibu Ketua, apakah tidak dikaitkan dengan kota lain ya? *Kok* hanya Ibu Kota Jakarta saja.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi yang dibahas Ibu Kota Jakarta saja kebetulan.

KETUA RAPAT:

Nanti kalau Ibu naik pesawat lihat begitu mau turun betapa pekat dan coklatnya awan di Jakarta. Jadi kita bicara Jakarta dulu nanti baru kota besar lainnya ya.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pencemaran udah Sebagian besar.

Bu Menteri, setuju, lima?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pencemaran udara berarti ya, maksudnya ya?

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Maksudnya, tidak hanya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pencemaran ya termasuk air, kalau pencemaran doang termasuk udara dan air *loh*. Pencemaran udara dulu.

KETUA RAPAT:

Harusnya di air juga, karena kan banyak orang membuang limbah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Enggak, udah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, berarti semua.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya, sebenarnya yang setuju ini saja biar mencakup lebih luwes.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pencemaran dan kerusakan lingkungan, memang lebih fleksibel.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

6. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencabut dan membekukan Hutan Tanaman Rakyat di Pulau Lingga dan sekitarnya, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan proses penegakan hukum dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya rapat kerja hari ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau gradasi administratifnya membekukan dulu baru mencabut, jadi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya mesti dibekukan dulu ya kita bekukan dulu baru dicabut, tapi kalau kasusnya bisa langsung dicabut ya dicabut. Jadi, gradasinya pembekuan dulu baru pencabutan.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi pembekukan di depan, terus maksudnya gini, Bu. Untuk segera membekukan...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Dan mencabut.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dan mencabut ya, itu kan tinggal dibali saja, baik. Itu saja yang diubah ya.

Para Anggota?
Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju.
Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.
Terima kasih.
Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang masalah tadi yang taman buru gimana? perlu kita masukkan kesimpulan rapat lagi? supaya ada penegasan lagi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kami laporkan saja, siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Kapan mau dilaporkan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kapan, Pak Roy? secepatnya. Dua minggu oke.

KETUA RAPAT:

Perlu dimasukkan disini? Sekalian saja tadi ditambahkan kata-kata tadi ya. Kata-katanya ditambahkan saja termasuk yang di Pulau Buru.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh, yang terakhir?

KETUA RAPAT:

Taman buru koma.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh, yang terakhir.

Bapak-Ibu,

Ada tambahan untuk poin 6, mana?

KETUA RAPAT:

Enggak pake "h".

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Buru doang. *Enggak* pake “ng”, *enggak* pake “h”. Pulaunya mana? bener? Pulau Rempang atau Galang?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pak Ketua, kalau dua minggu untuk seluruh pulau, susah. Sebulan bisa *enggak* Pak Roy? enam bulan, lama.

KETUA RAPAT:

Bukan, kemarin dikasih 4 bulan juga tetep *kagak* ada laporannya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Dua minggu Pulau Buru dulu *eh* Taman Buru dulu aja, Ketua, metodenya dapat nanti kita genjot lagi.

KETUA RAPAT:

Satu bulan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Rempang, Galang, Batam.

KETUA RAPAT:

Kan sudah ada catatannya, ini aja saya punya *nih*. 170 kasus ini, kalau kementerian *enggak* punya data ya bingung sayanya. Kemarin juga 4 bulan tidak ada *progress*. Kita seminggu *enggak* cukup, kita kasih 1 bulan. Tadi harusnya ada nomor 6, ada nomor 7, jangan digabung, *gitu loh*. Ini payah anak-anak ini sudah dikasih tahu, nomor 6 itu itemnya adalah mencabut izin usaha yang itu dulu apa mangrove dulu yang di Pulau Lingga dan lain-lain. Kemudian nomor 7 ini masalah yang pulau buru, taman buru dan lain-lain, itu *loh*. *Enggak* pinter-pinter juga kalian ini.

Mau diisi berapa lama itu, Bu Menteri? Boleh yang penting kita konsekuen saja. Kalau bicara 2 bulan, 2 bulan. Lah itu 4 bulan, *enggak* ada *progress*, sekarang kita kasih 2 bulan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Izin Ketua, kalau yang saya tangkap pengertian penindakan Pak Roy, itu sampai pembekuan dan pencabutan, berarti kan diawalnya dari apa namanya segel, identifikasi.

KETUA RAPAT:

Tadi Bu, Pak Dirjen Gakkum mengatakan kan sudah disegel, ya *toh?* kenapa *enggak* ditindaklanjuti? Itu aja. Kalau bicara 2 bulan seluruhnya memang tidak mungkin, tapi kalau tidak ada *progress* sudah disegel ditinggalin, segel dicabut lagi, ya kan? Ya, *progress*-nya berapa tinggal dilaporkan, kan gitu. Kalau 2 bulan memang seluruhnya tidak mungkin bisa, di Batam itu masalah terlalu banyak, tetapi kalau sudah disegel, ditinggalin, ya kan? Yang nomor 6 dibacain dulu Bu Ketua, terus nomor 7. Udah mau magrib ini.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Ketua, mau imamin shalat magrib.

Yang tujuh dong, yang enam bukannya sudah tadi. Enam sudah, kita kan tidak merubah.

KETUA RAPAT:

**RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penindakan atas semua kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan yang berada di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, termasuk di dalam Taman Buru Provinsi Kepulauan Riau, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dilaksanakan rapat kerja kali ini.

Para Anggota?
Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju.
Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kita sudah mencapai akhir dari rapat kerja hari ini yang mana besok malam itu seluruh laporan ini akan diserahkan ke Badan Anggaran.

Sebelum kami menutup rapat kerja ini, silakan Ibu Menteri LHK untuk menyampaikan kata penutup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas catatan-catatan kritis mulai dari hal-hal yang sangat prinsip sampai kepada hal-hal *practical* di keseharian dan juga terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas dukungan fasilitasi termasuk anggaran tambahan dan catatan-catatan kritis yang hari ini saya menangkapnya sangat produktif untuk dapat menjadi *guidance* bagi kerja-kerja LHK lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang tepat dari jajaran Kementerian LHK dan eksekutif lainnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom.

Om Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT:

Kan namanya kita diskusi Bu, ya diskusi kan supaya mendapatkan hal yang terbaik, bukan semata-mata kami mencari kesalahan, *enggak*, karena kalau pengusaha nakal terus didiemin ya besok tambah lagi, sama juga dengan misalnya pedagang kaki lima. Kalau satu dibiarin, makin lama makin banyak mengganggu trotoar kemudian digusur kan sama-sama menyakitkan, ya kan. Lebih baik kan ditata dari awal.

Terima kasih, dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila kami memimpin rapat ada kekurangan, ada kekhilafan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, rapat kerja hari ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.50 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

a. n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002